

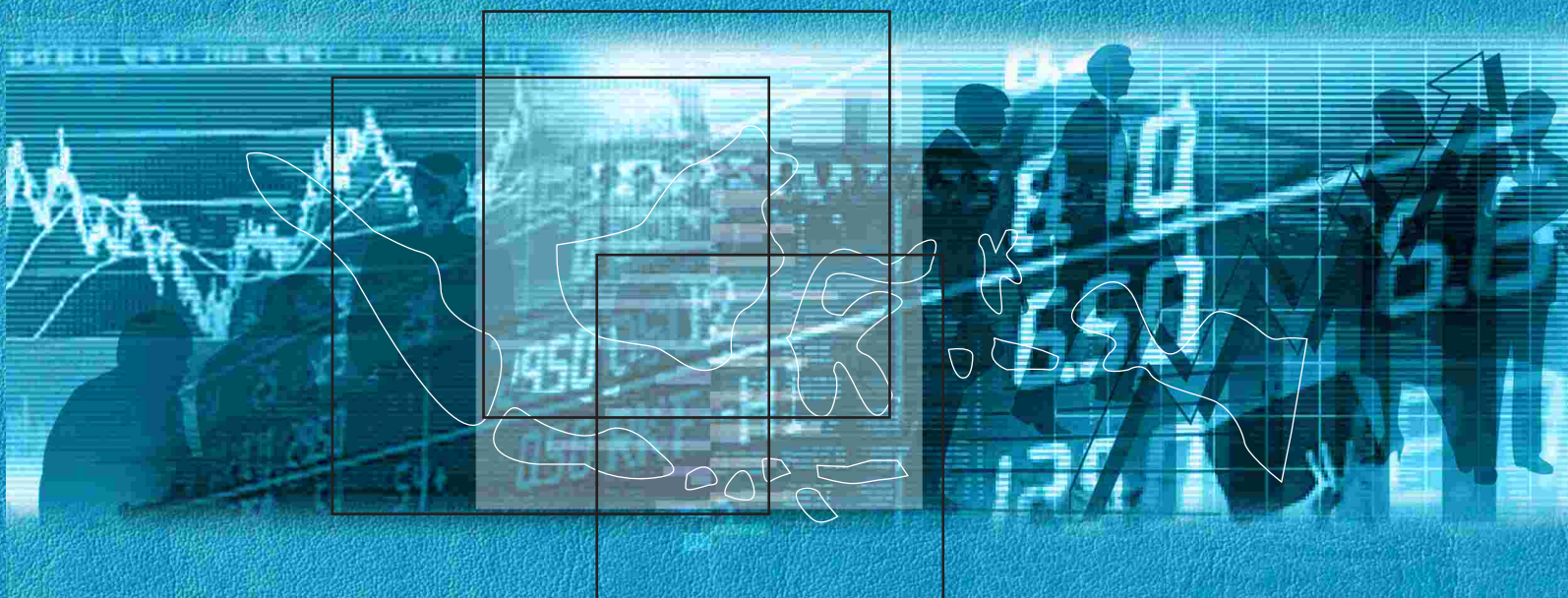
DASAWARSA 2006
PEKERJAAN LAYAK 2015
ASIA



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2010

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi
penciptaan lapangan kerja



Kantor ILO untuk Indonesia

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2010

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi
menjadi penciptaan lapangan kerja

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN 978-92-2-024855-3 (print)
978-92-2-024856-0 (web pdf)

ILO

Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2010: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2011
vi, 67 p

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: *Labour and social trends in Indonesia 2010: Translating economic growth into employment creation*/ International Labour Office – Jakarta: ILO, 2011
vi, 63 p.

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org
Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Prakata

Edisi ketiga dari *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia* berpusat pada pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja yang layak dan pekerjaan yang produktif. Indonesia mampu bertahan menghadapi resesi global jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga yang perekonomiannya lebih maju, dengan memelihara pertumbuhan ekonomi yang positif. Prediksi-prediksi terkait ekonomi dari berbagai sumber meramalkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat bagi Indonesia, di atas enam persen per tahun di tahun-tahun mendatang. Hal ini jelas memperlihatkan peluang-peluang yang terbentang di hadapan Indonesia.

Satu hal yang harus diingat, bagaimanapun, penciptaan lapangan kerja tidak selalu merupakan hasil yang secara otomatis diperoleh dari pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, banyak negara di dunia pernah mengalami apa yang disebut pertumbuhan angka pengangguran. Selanjutnya, tidak semua warga negara akan mendapatkan keuntungan dari perluasan ekonomi jika keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan tersebut tidak disalurkan dalam bentuk pekerjaan yang produktif dan kondisi kerja yang lebih baik. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi, tidak peduli berapapun tingginya, tidak akan secara otomatis menciptakan lapangan kerja atau menjamin adanya akses bagi semua pekerja terhadap peluang-peluang ekonomi yang baru tercipta.

Indonesia telah bangkit dari pergolakan ekonomi dan politik akibat krisis keuangan Asia. Negara ini telah mempertahankan pertumbuhan yang positif selama hampir satu dekade. Kendati demikian, jika kita mengalihkan perhatian kepada kinerja pasar tenaga kerja selama periode yang sama, kami mencatat, misalnya, besarnya pertumbuhan ekonomi tidak memperluas lapangan kerja formal. Upah nyata hanya sedikit meningkat selama dekade lalu. Apakah Indonesia akan mengulangi hal yang sama di tahun-tahun mendatang? Para perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha menggunakan sebuah kerangka kebijakan, Pakta Lapangan Kerja Global (*Global Jobs Pact*), dan telah menunjukkan kebulatan tekad untuk mewujudkan pertumbuhan yang kaya akan lapangan kerja di Indonesia. Inilah mengapa kami sangat percaya bahwa tema pokok dari laporan ini, mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja, sangat relevan dan tepat waktu sejalan dengan pembahasan dan tindakan kebijakan di Indonesia saat ini.

Laporan ini disusun oleh Kazutoshi Chatani. Laporan ini tercipta berkat dukungan teknis dan komentar-komentar berharga yang diberikan rekan-rekan ILO Jakarta; Unit Analisis Sosial dan Ekonomi Regional - Kantor Regional ILO untuk Asia Pasifik; dan Kantor Pusat ILO di Jenewa.

Kami berharap bahwa laporan ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang menyeluruh dan perluasan lapangan kerja di Indonesia di masa mendatang. Kami mendukung para konstituen kami di Indonesia dengan keahlian dan program kerja sama teknis, serta menjalin kerja sama untuk mewujudkan jalur kaya-pekerjaan dari pertumbuhan ekonomi yang akan menguntungkan semua warga negara dan mengarah pada pekerjaan yang layak untuk semua.

Peter van Rooij
Direktur
Kantor ILO Jakarta

Daftar Singkatan dan Istilah Bahasa Indonesia

ADB	Bank Pembangunan Asia (<i>Asian Development Bank</i>)
ASABRI	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASKES	Asuransi Kesehatan Indonesia
ASKESKIN	Asuransi Kesehatan Orang Miskin
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (<i>Association of Southeast Asian Nations</i>)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	Bank Indonesia
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
EU	Uni Eropa (<i>European Union</i>)
PDB	Produk Domestik Bruto (<i>Gross Domestic Product</i>)
ILO	Organisasi Perburuhan Internasional (<i>International Labour Organization</i>)
IMF	Dana Moneter Internasional (<i>International Monetary Fund</i>)
JAMKESMAS	Jaminan Kesehatan Masyarakat
JAMSOSTEK	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KILM	Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (<i>Key Indicators of the Labour Market</i>)
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LFS	Survei Angkatan Kerja (<i>Labour Force Survey</i>)
MDG	Sasaran Pembangunan Milenium (<i>Millennium Development Goal</i>)
Kemenakertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
OECD	Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>)
PKH	Program Keluarga Harapan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPP	Keseimbangan Daya Beli (<i>Purchasing Power Parity</i>)
Rp.	Rupiah
TASPEN	Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri
RASKIN	Beras Miskin
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

Catatan : Di seluruh laporan ini, nilai tukar yang digunakan adalah 1 USD = Rp 9,000

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Singkatan dan Istilah Bahasa Indonesia	iv
Ringkasan Eksekutif	1
1. Tren ekonomi dan pasar tenaga kerja	5
1.1 Tren ekonomi	5
1.2 Tren pasar tenaga kerja	11
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja	27
2.1 Gambaran Umum	27
2.2 Penciptaan Lapangan Kerja	28
2.3 Produktivitas Tenaga Kerja	36
2.4 Hubungan Antarindustri	42
2.5 Perlindungan Sosial	49
Lampiran-Lampiran	
I Data BPS tentang Penyebaran pekerjaan di dalam ekonomi formal dan informal	55
II Lampiran statistik	56
Daftar Tabel	
Tabel 1.1 Neraca Nasional (atas dasar harga konstan 2000)	6
Tabel 1.2 Upah para pekerja produksi dalam produksi di bawah penyalia	10
Tabel 1.3 Pembagian pekerjaan informal dan semi-pengangguran (persen)	13
Tabel 1.4 Pembagian pekerjaan berdasarkan status pekerjaan (persen)	14
Tabel 1.5 Jumlah pekerjaan menurut lapangan kerja (persen)	15
Tabel 1.6 Proporsi dan pertumbuhan keluaran dan lapangan kerja berdasarkan sektor (PDB berdasarkan harga konstan 2000)	16
Tabel 1.7 Jumlah pekerjaan dan tingkat pertumbuhan berdasarkan sektor dan jenis kelamin	16
Tabel 1.8 Jumlah tenaga kerja yang berpindah berdasarkan daerah tujuan (ribu)	20
Tabel 1.9 Proyeksi angkatan kerja	21
Tabel 1.10 Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan (tahunan 2009-2014, %)	22
Tabel 1.11 Target 1B MDG	24
Tabel 2.1 Kemudahan dalam melakukan bisnis di beberapa kota tertentu di Indonesia	30
Tabel 2.2 Estimasi perolehan dan kehilangan pekerjaan penuh waktu karena persetujuan perdagangan bebas dengan Cina (sektor-sektor terpilih, 2008)	33

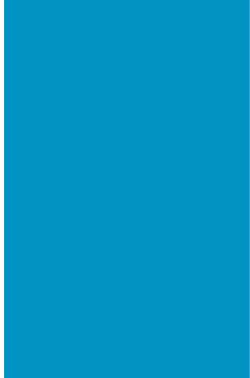
Tabel 2.3	Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja rata-rata tahunan (persen)	38
Tabel 2.4	Serikat pekerja di Indonesia tahun 2008	46
Tabel 2.5	Angka kontribusi jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)	50
Tabel 2.6	Jaminan sosial di Indonesia	50
Tabel 2.7	Program-program sosial utama yang ditujukan bagi rumah tangga dan masyarakat miskin	51
Tabel 2.8	Tiga kelompok sistem program-program sosial	51

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tingkat pertumbuhan ekonomi (negara-negara ASEAN tertentu, persen)	5
Gambar 1.2	Pengeluaran pada PDB (berdasarkan harga konstan 2000, trilyun Rupiah)	6
Gambar 1.3	Komposisi ekspor Indonesia (% ekspor barang dagangan)	7
Gambar 1.4	Pertumbuhan PDB berdasarkan sektor (berdasarkan harga konstan 2000, persen)	8
Gambar 1.5	Kontribusi terhadap pertumbuhan PDB berdasarkan sektor (berdasarkan harga konstan 2000, persen)	8
Gambar 1.6	Nilai tukar Dolar Amerika Serikat - Rupiah	10
Gambar 1.7	Angkatan kerja dan pertumbuhan lapangan kerja (indeks, 1991=100)	11
Gambar 1.8	Tingkat pengangguran (persen)	13
Gambar 1.9	Indeks upah riil untuk pekerja produksi di bawah penyelia (Maret 2005=100)	18
Gambar 1.10	Kesenjangan upah berdasarkan pencapaian pendidikan (upah untuk tenaga kerja dengan pendidikan dasar =100)	19
Gambar 1.11	Remitansi tenaga kerja dan kompensasi pegawai yang diterima	21
Gambar 1.12	Tingkat pengangguran, pekerjaan informal, dan kemiskinan (2009)	25
Gambar 2.1	Perbandingan kinerja pelajar internasional (hasil survei OECD PISA, 2006 dan 2009)	31
Gambar 2.2	Produktivitas tenaga kerja per orang yang dipekerjakan (di tahun 2010 dolar Amerika Serikat pada PPP/Keseimbangan Daya Beli)	37
Gambar 2.3	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja (konstan 2000 dolar Amerika Serikat)	38
Gambar 2.4	PDB per tenaga kerja berdasarkan sektor (berdasarkan harga konstan 2000, dolar Amerika Serikat, 2009)	39
Gambar 2.5	Andil keterampilan dan pertanian dalam PDB	39
Gambar 2.6	Angkatan kerja berdasarkan pencapaian pendidikan (2007, %)	40
Gambar 2.7	Ekspor teknologi tinggi (sebagai % dari ekspor yang diproduksi, 2008)	40
Gambar 2.8	Kerangka analisa kesenjangan keterampilan	42
Gambar 2.9	Pengeluaran untuk perlindungan sosial (sebagai % PDB, 2004-2008)	52
Gambar 2.10	Pengeluaran negara untuk jaminan sosial (sebagai % PDB, Data tahun terakhir)	53

Daftar Kotak Teks

Kotak 1:	Target 1B MDG: Mencapai pekerjaan produktif dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan kaum muda	23
Kotak 2:	Berbagai praktik terbaik untuk meningkatkan lingkungan usaha	29
Kotak 3:	Sistem Neraca Sosial Ekonomi	33
Kotak 4:	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tantangan-tantangan utama di Indonesia	47



Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyoroti kebutuhan akan hubungan yang koheren (saling berkaitan) dari ekonomi makro, pasar tenaga kerja, dan kebijakan sosial guna mewujudkan perluasan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak, yang mengarah pada pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, yang bertahan selama satu dasawarsa setelah krisis keuangan Asia, gagal menciptakan lapangan pekerjaan produktif yang memadai dalam perekonomian formal, menyisakan sebagian besar penduduk terlibat dalam pekerjaan informal dan hidup di bawah atau rentan terjatuh ke bawah garis kemiskinan dengan penghasilan dua dolar Amerika Serikat per hari. Secara umum, Indonesia dapat bertahan melalui resesi global secara lebih baik dibandingkan kebanyakan negara dan memiliki prospek ekonomi yang cerah untuk tahun-tahun mendatang. Pertanyaannya adalah apakah dan bagaimanakah Indonesia dapat meraih kesempatan ini dan memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Karenanya, laporan ini terfokus pada hubungan ketiga hal di atas serta memberikan analisa dan informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan.

Perekonomian Indonesia terus meningkat selama lebih satu dasawarsa akibat meningkatnya konsumsi pribadi dan investasi. Kendati dampak negatif dari krisis keuangan global dirasakan di hampir seluruh wilayah, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 dan 2010. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini dipimpin oleh sektor jasa dengan pertumbuhan yang luar biasa di sektor komunikasi. Prospek Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi tetap menguat di tahun-tahun mendatang dan tampaknya terdapat ruang fiskal yang lebih besar bagi investasi dalam meningkatkan inklusifitas pertumbuhan ekonomi. Kebijakan keuangan umumnya terfokus pada inflasi yang terkontrol. Sasaran kebijakan dapat diperluas dengan merangkul tujuan-tujuan kebijakan lainnya termasuk ekspansi ekonomi riil dan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak. Tingkat pertukaran mata uang pun mempengaruhi ketenagakerjaan melalui dampak terhadap volume perdagangan dan biaya kerja dalam mata uang investor asing.

Dalam banyak hal, pasar tenaga kerja Indonesia tidak pernah sepenuhnya pulih dari krisis keuangan Asia. Persentase pekerjaan informal dan semi pengangguran (*underemployment*) kurang lebih tetap sama sejak tahun 1996 sebelum krisis terjadi. Peluang kerja untuk kaum muda nyaris tidak berkembang selama dasawarsa terakhir. Sementara pertumbuhan upah tenaga kerja stagnan, pekerjaan lepas meningkat secara cepat. Penurunan berturut-turut yang terjadi beberapa tahun terakhir dalam tingkat pengangguran menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari jumlah pekerjaan namun meninggalkan kekhawatiran atas aspek kualitas pekerjaan.

Sebagai cermin dari perubahan struktural dalam perekonomian, kesempatan kerja semakin terbuka di sektor jasa. Pergeseran di segi pekerjaan ini telah mengubah tuntutan keterampilan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kurangnya tenaga kerja terampil dan berlebihan jumlah tenaga kerja dengan keterampilan yang relatif rendah di Indonesia, mendorong membesarnya kesenjangan upah. Bahkan, upah riil untuk para pekerja produksi menurun antara tahun 2005 dan 2009. Dari sisi positif, lebih banyak perempuan memperoleh peluang kerja di sektor jasa yang sedang berkembang, yang membantu mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja.

Guna mengatasi tantangan perekonomian dan pasar tenaga kerja, bagian kedua dari laporan ini menyoroti empat bidang kebijakan kunci, yang memberikan rekomendasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi penciptaan lapangan kerja yang produktif. Bidang-bidang kebijakan ini adalah sebagai berikut: (1) Penciptaan lapangan kerja; (2) Produktivitas tenaga kerja; (3) Hubungan industrial; dan (4) Perlindungan sosial. Tema utama dari laporan ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak, namun pertumbuhan tidak dengan sendirinya memperluas peluang kerja dan mengurangi kemiskinan. Laporan ini menyoroti peluang-peluang yang ada di dalam ke-empat bidang prioritas kunci yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak. Berikut adalah ringkasan dari beberapa rekomendasi serta hal-hal yang memerlukan perhatian dari para pembuat kebijakan:

Penciptaan Lapangan Kerja

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan bagi penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak. Indonesia dapat memanfaatkan potensi pertumbuhannya dengan mengatasi kendala-kendala penting bagi pertumbuhan: (1) Kurangnya jumlah dan rendahnya mutu infrastruktur; (2) Kelemahan dalam pemerintahan dan lembaga-lembaganya; dan (3) Akses yang tidak setara terhadap pendidikan dan mutu pendidikan yang rendah. Indonesia juga memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan lingkungan bisnis dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dari administrasi publik di dalam negeri. Memperluas potensi yang ada pada sektor swasta dengan sendirinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kontribusi pengembangan keterampilan strategis kepada pembangunan sektor dan penciptaan lapangan kerja merupakan titik kunci lainnya yang disoroti dalam laporan ini.

Agar pertumbuhan ekonomi menjadi inklusif, akses para pekerja dalam posisi-posisi yang kurang menguntungkan di pasar tenaga kerja (misalnya pekerja miskin, pengangguran dan pekerja dengan kontrak tidak tetap) terhadap pekerjaan yang produktif merupakan sebuah elemen yang penting. Akses yang tidak merata dan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, bagaimanapun, membatasi akses banyak pekerja terhadap peluang-peluang produktif.

Beberapa pengamat menyatakan bahwa peraturan tenaga kerja menyebabkan tingginya informalitas dalam pekerjaan dan lambatnya penciptaan lapangan kerja. Kendati demikian, penegakan peraturan ketenagakerjaan menyisakan banyak ruang untuk perbaikan (misalnya uang pesangon dan upah minimum tidak ditegakkan dengan baik), sehingga meruntuhkan keabsahan klaim tersebut. Yang sangat penting adalah pemerintah serta para mitra sosial terlibat dalam dialog sosial yang membangun dan membahas reformasi yang diperlukan dalam peraturan ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan kerja saat ini, khususnya jaminan penghasilan untuk pengangguran dan pensiun, tidak dapat dipisahkan dari sistem jaminan sosial yang kurang memadai. Karenanya, sangat disarankan pengembangan sistem jaminan sosial yang melindungi risiko usia tua dan pengangguran dilakukan sejalan dengan perundingan tentang reformasi peraturan ketenagakerjaan.

Penciptaan lapangan kerja di Indonesia semakin dipengaruhi perdagangan, seiring dengan terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam pasar regional dan global. Volume dan intensitas tenaga kerja bagi barang-barang ekspor dan impor serta pengaruh riak (*ripple*) ekonomi pada sektor-sektor terkait menentukan pengaruh perdagangan terhadap lapangan kerja. Dalam kasus perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, Indonesia diperkirakan membuka lapangan kerja, terutama di bidang pertanian. Bagaimanapun, kehilangan pekerjaan terjadi di sektor-sektor seperti tekstil, garmen, dan pakaian, di mana persentase ketersediaan lapangan kerja bagi kaum permepuan muda terbilang tinggi.

Teori-teori ekonomi yang berlaku dan bukti empiris yang ada dengan jelas menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan dalam bentuk peningkatan lapangan kerja dan upah. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia telah meningkat dengan stabil. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa saingan Indonesia, Thailand dan Cina, telah semakin meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya dan melampaui tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Produktivitas kerja dapat meningkat dengan mengalihkan pekerja dari sektor yang berproduktivitas rendah ke sektor-sektor lainnya dan/atau mengadopsi teknologi dan inovasi modern serta meningkatkan kapasitas produksi sektor tersebut. Mengalihkan tenaga kerja pertanian dengan produktivitas yang rendah dan jumlah tenaga kerja yang berlebihan ke sektor-sektor lainnya mengarah pada pertumbuhan dari sektor non-pertanian dan pengembangan keterampilan yang diperlukan. Sejak sektor sekunder

*Produktivitas
tenaga kerja*

dan tersier membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan sektor utama, penekanan yang lebih besar pada pelatihan pendidikan dan keterampilan menjadi penting. Selanjutnya, peningkatan produktivitas kerja memerlukan angkatan kerja terampil yang dapat menyerap teknologi produksi yang modern.

Hubungan industrial

Dialog sosial di tingkat nasional dapat memberikan pengaruh positif yang kuat pada kesempatan kerja produktif dan pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat perusahaan, hubungan industrial yang konstruktif mengarah pada peningkatan kondisi kerja, yang secara positif berkaitan dengan produktivitas yang lebih tinggi dan dengan demikian meningkatkan profitabilitas. Hal-hal tersebut sangat didukung oleh bukti empiris yang tersedia. Negara-negara, seperti Jepang, Belanda dan Swedia telah mampu menjalin kesepakatan di antara para mitra sosialnya dalam berbagai persoalan sosial dan ekonomi, yang telah memberikan kemampuan kepada pemerintah di negara-negara tersebut untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lapangan kerja yang produktif secara bersamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan dorongan yang kuat terhadap peningkatan budaya dan praktik dialog sosial antara sektor swasta, serikat pekerja, dan pemerintah. Walaupun begitu, masih ada ruang besar untuk perbaikan, khususnya dalam hal kapasitas tawar pekerja. Kapasitas tawar yang lemah ini telah diterjemahkan ke dalam pengaturan upah yang sesungguhnya tanpa perolehan alternatif.

Perlindungan sosial

Sistem perlindungan sosial Indonesia terdiri dari kombinasi pola asuransi sosial (inti dari sistem) dan sejumlah program yang ditargetkan untuk masyarakat kurang mampu. Pola asuransi sosial saat ini sebagian besar mencakup para pekerja yang relatif mampu. Hal ini dilengkapi dengan program-program sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Di bawah sistem yang berlaku saat ini, sebagian besar pekerja yang berada di golongan penghasilan menengah mendapati diri mereka tertinggal dari program tersebut. Dengan demikian, pemerintah telah mengadaptasi program-program sosial untuk lebih inklusif (mencakup semua kalangan). Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga dalam hal pengeluaran negara untuk perlindungan sosial. Karenanya, masih ada ruang untuk pengembangan fiskal lebih lanjut. Di samping mengembangkan ketentuan sosial, pemerintah pun telah melakukan upaya besar untuk mengatasi sistem penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

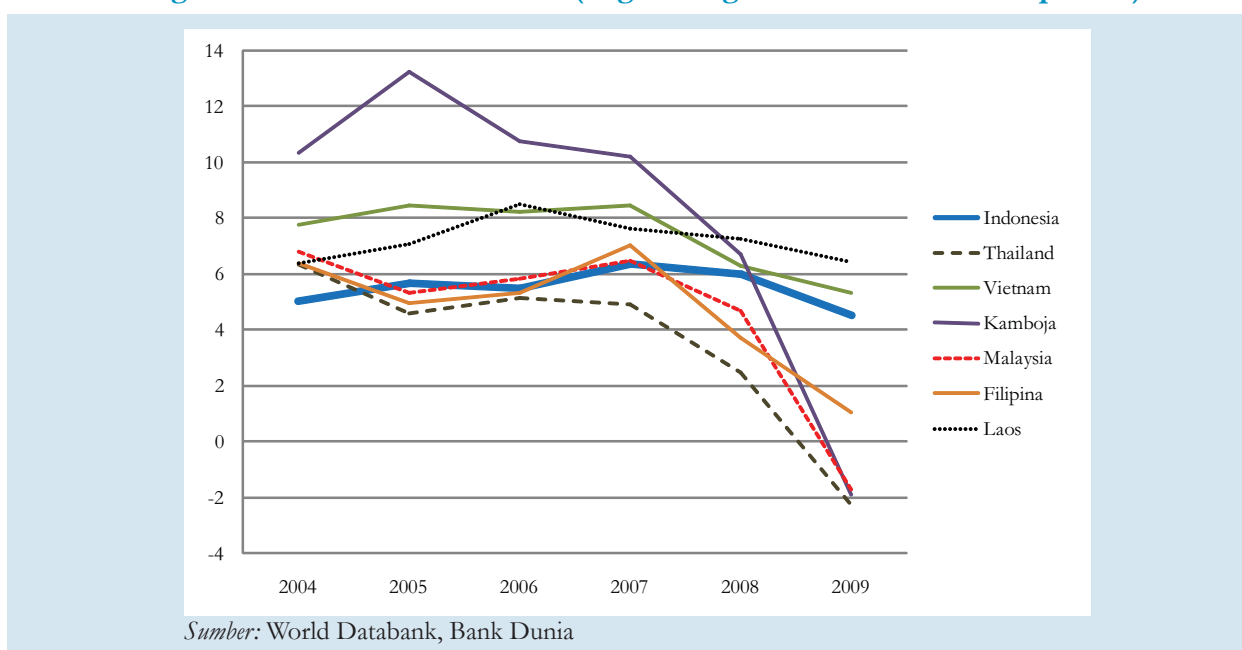
Tren Ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja

1.1 Tren Ekonomi

Indonesia bertahan menghadapi krisis secara lebih baik dibandingkan negara-negara lain dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2009 dan 2010. Pasar dalam negeri Indonesia yang besar membantu mengurangi dampak krisis yang ditularkan melalui perdagangan eksternal dan sistem keuangan global yang sakit. Berbagai sumber bahkan mengindikasikan pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2011. Pemerintah Indonesia menargetkan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 6,3 sampai 6,8 persen antara tahun 2010 dan 2014 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). Bank Pembangunan Asia (ADB) melihat pertumbuhan PDB di Indonesia sebesar 6,3 persen.¹ Target pertumbuhan Bank Dunia pada tahun 2011 sebesar 6,2 persen pada 2011.²

Prospek ekonomi yang baik

Gambar 1.1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (negara-negara ASEAN tertentu, persen)



1 ADB (2010) *Asian Development Outlook 2010 Update* (Manila)

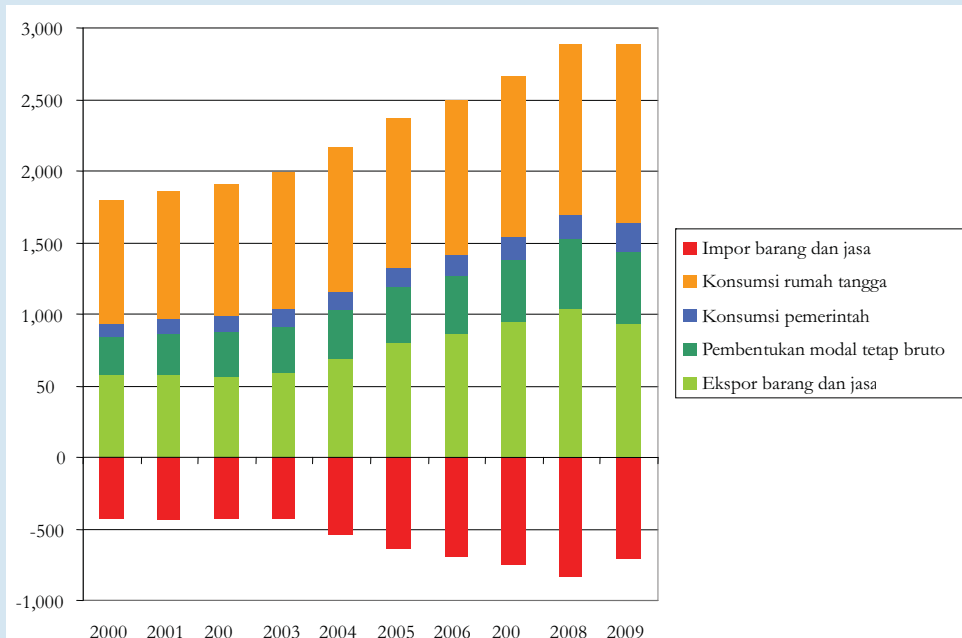
2 World Bank (2010) *Indonesia Economic Quarterly: Maximizing opportunities, managing risks* (Jakarta)

*Pendorong
pertumbuhan :
konsumsi rumah
tangga dan investasi*

Motor kembar pertumbuhan ekonomi selama dasawarsa terakhir adalah konsumsi pribadi dan investasi (pembentukan modal tetap bruto) (Gambar 1.2). Konsumsi pribadi tidak menunjukkan tanda-tanda dampak negatif yang terkait dengan resesi global. Dengan konsumsi rumah tangga dan publik menyumbang lebih dari 65 persen PDB selama dasawarsa terakhir, tampak bahwa perekonomian relatif tahan terhadap guncangan perdagangan dari luar. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menyumbang 49,8 persen kepada pertumbuhan PDB antara tahun 2000 dan 2009. Kontributor kedua adalah pembentukan modal tetap bruto, yang menghasilkan 29,8 persen dari pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan tahunan dari pembentukan modal bruto mencapai 7,1 persen, menjadikannya kategori pertumbuhan tercepat kedua dalam neraca nasional. Peningkatan dalam konsumsi pemerintah termasuk berbagai subsidi selama periode ini menyumbang 13,4 persen dari ekspansi ekonomi.

Gambar 1.2

Pengeluaran pada PDB (atas dasar harga konstan 2000, trilyun rupiah)



Sumber: ADB Statistical Database System, for 2009: BPS.

Tabel 1.1

Neraca Nasional (atas dasar harga konstan 2000)

	Tahun 2000 (Milyar Rupiah)	Tahun 2009 (Milyar Rupiah)	Tingkat Pertumbuhan Tahunan (2000-2009, %)	Kontribusi bagi Pertumbuhan (2000-2009, %)
Konsumsi rumah tangga	856.798,3	1.249.011,2	4,3	49,8
Konsumsi pemerintah	90.779,7	195.907,7	8,9	13,4
Pembentukan modal tetap bruto	275.881,2	510.118,1	7,1	29,8
Ekspor bersih	146.172,4	223.537,0	4,8	9,8
Produk Domestik Bruto (PDB)	1.389.770,3	2.082.103,7	5,1	100,0*

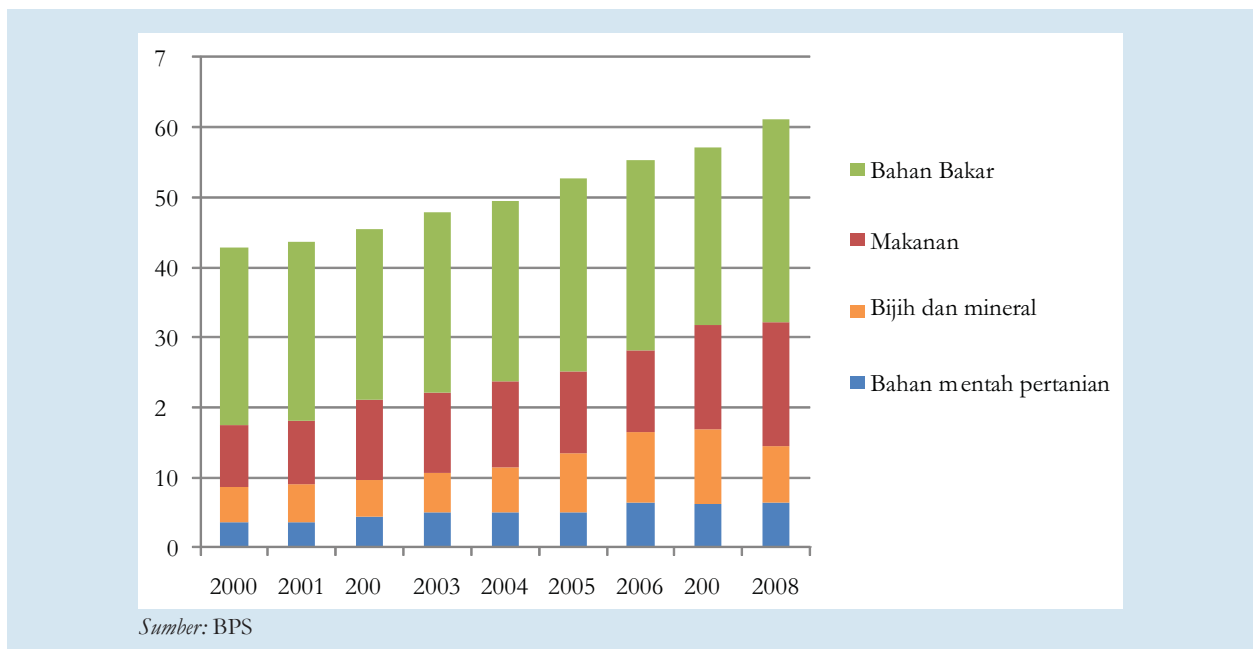
Sumber: Asian Development Bank's Statistical Database System, kalkulasi penulis

Catatan *: Peningkatan dalam persediaan dan perbedaan statistik berturut-turut sebesar -2.6% dan -0.1%

Ekspor dan impor barang dan jasa meningkat berturut-turut sebesar 5,6 dan 5,9 persen antara tahun 2000 dan 2009. Tren ekspansi perdagangan yang berkelanjutan sejak tahun 2002, mengalami kebalikan di tahun 2009 karena adanya penurunan jumlah permintaan global. Ekspor barang dan jasa turun sebesar 9,7 persen dari tahun 2008 ke 2009.³ Meski ekspor mendorong PDB Indonesia, adalah penting untuk dicatat bahwa sebagian besar ekspor Indonesia adalah komoditas, dan harga pasar barang-barang tersebut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Bahkan, persentase ekspor bahan bakar, bijih dan mineral, bahan mentah pertanian dan makanan dalam ekspor barang dagangan terus meningkat dari 42,9 persen di tahun 2000 menjadi 61,2 persen di tahun 2008. Ledakan komoditas sebelum resesi global saat ini mendorong kinerja perekonomian Indonesia dengan hanya memberikan sedikit dampak pada penciptaan lapangan kerja.

Ketergantungan yang semakin berkembang terhadap ekspor komoditas

Gambar 1.3
Komposisi Ekspor Indonesia (% ekspor barang dagangan)

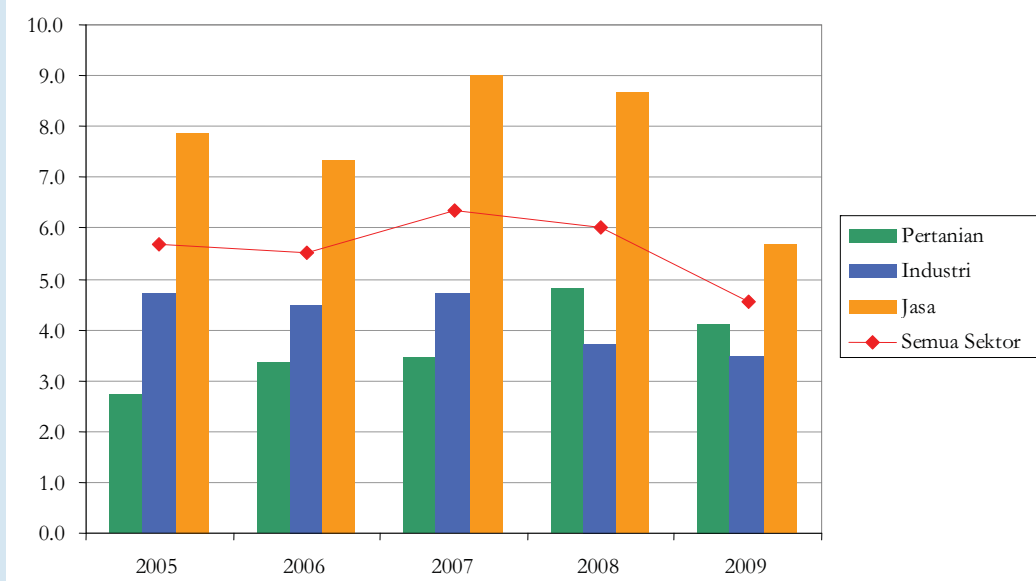


Asal sektor pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa sektor jasa merupakan pendorong utama dari ekspansi ekonomi Indonesia antara tahun 2005 dan 2009. Sektor jasa mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar lebih dari tujuh persen antara tahun 2005 dan 2008, menyumbang lebih dari setengah pertumbuhan PDB di Indonesia (Gambar 1.4 dan Gambar 1.5). Bahkan, 62,2 persen pertumbuhan ekonomi di tahun 2008 berasal dari sektor jasa. Di dalam sektor jasa, sektor komunikasi telah mencatat pertumbuhan yang luar biasa. Andil sektor komunikasi dalam PDB meningkat lebih dari dua kali, dari sebesar 2,3 persen di tahun 2004 menjadi 5,5 persen di tahun 2009. Sektor ini sendiri mendorong peningkatan PDB sebesar 1,1 dan 1,0 titik persentase (*percentage points*) di tahun 2008 dan 2009. Kendati demikian, dampak pertumbuhan sektor telekomunikasi terhadap ketenagakerjaan tidak terlalu mencolok.

Pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor jasa

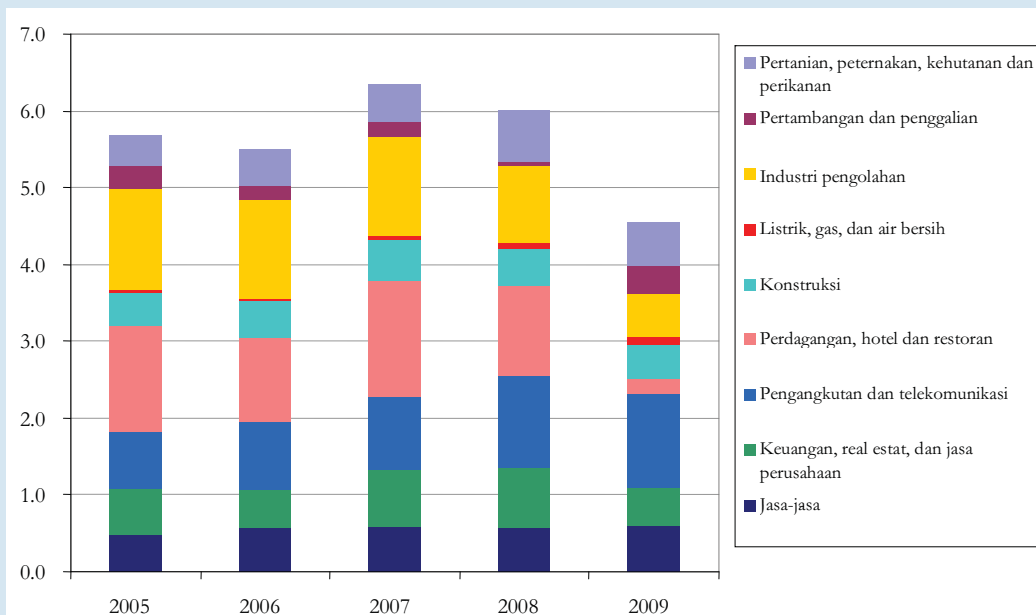
3 Ekspor bersih meningkat pada tahun 2009 dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 24,5 triliun (2,7 milyar dolar Amerika Serikat) karena adanya penurunan tajam di sektor impor.

Gambar 1.4
Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (atas dasar harga konstan 2000, persen)



Sumber : ADB, Indikator-indikator Kunci untuk Asia dan Pasifik 2010

Gambar 1.5
Kontribusi Terhadap Pertumbuhan PDB Berdasarkan Sektor (atas dasar harga konstan 2000, persen)



Sumber: BPS, kalkulasi penulis

*Kebijakan fiskal:
ruang kebijakan
yang lebih besar di
masa mendatang*

Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang positif, meski di tengah krisis, Indonesia telah mempertahankan posisi fiskal yang kuat. Defisit anggaran pemerintah untuk tahun 2010 ditargetkan sebesar 2,1 persen menurut revisi anggaran tahun 2010 yang disetujui DPR. Defisit anggaran yang sebenarnya mungkin lebih kecil dari sasaran karena lemahnya pencairan anggaran dan harga komoditas yang diperkirakan lebih tinggi

yang akan meningkatkan pendapatan pemerintah.⁴ Rasio utang terhadap PDB (*debt-to-GDP ratio*) mengalami penurunan antara tahun 2005 dan 2009. Meskipun pemerintah memberikan paket stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun di awal 2009, tampaknya kecil kemungkinan pemerintah akan menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif karena tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan diperkirakan akan positif, di atas 6 persen di tahun-tahun mendatang. Manajemen fiskal yang bijaksana dan kemungkinan naiknya penerimaan pajak akan membawa ruang kebijakan yang lebih besar bagi Indonesia, sehingga menciptakan peluang-peluang untuk meningkatkan investasi dalam upaya meningkatkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia (BI) menetapkan bahwa tujuan bank sentral adalah mempertahankan stabilitas rupiah Indonesia. Menindaklanjuti mandat ini, BI menerapkan kerangka target inflasi (*Inflation Targeting Framework*) di tahun 2005. Untuk tahun 2010 dan 2011 angka yang ditargetkan sebesar lima persen dengan margin sebesar satu persen. Kebijakan suku bunga (*BI Rate*) telah digunakan untuk mengendalikan inflasi. Kendati selama tahun 2009, BI menurunkan kebijakan suku bunga dari 9,25 persen di bulan Desember 2008 menjadi 6,50 persen di bulan Agustus 2009 untuk mengurangi dampak krisis terhadap perekonomian Indonesia, suku bunga dijaga tetap tinggi pada periode sebelum krisis. Di masa lalu, kebijakan moneter yang berdasarkan target inflasi tidak efektif dalam menjinakkan inflasi yang disebabkan tekanan harga (misalnya inflasi yang disebabkan oleh pengurangan subsidi bahan bakar di tahun 2005 dan inflasi karena krisis pangan global di tahun 2008).⁵ Tingginya suku bunga yang terkait dengan kebijakan suku bunga mungkin telah menyebabkan tingginya biaya dalam hal kehilangan investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam ekonomi formal.

*Kebijakan moneter
berfokus pada sebuah
target inflasi*

Kebijakan nilai tukar BI dirancang untuk meminimalisasi volatilitas yang berlebihan dalam nilai tukar untuk mencapai target inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Selama dasawarsa terakhir, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Indonesia berkisar di sekitar US\$ 1 = Rp 9,000. Karena lebih tingginya inflasi di Indonesia dibandingkan di Amerika Serikat, rupiah Indonesia meningkat secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dalam waktu riil sejak 2011.⁶ Apresiasi rupiah ini mungkin memberikan pengaruh negatif bagi eksportir dan produsen yang bersaing dengan barang dan jasa impor di Indonesia. Upah tenaga kerja produksi di bawah penyelia (*supervisor*) dalam industri pengolahan (manufaktur) meningkat banyak jika dilihat dari nilai dolar Amerika Serikat (Tabel 1.2), sedangkan upah mereka yang sesungguhnya dalam nilai rupiah Indonesia hanya meningkat sebesar enam

*Apresiasi mata
uang mempengaruhi
industri dalam
negeri*

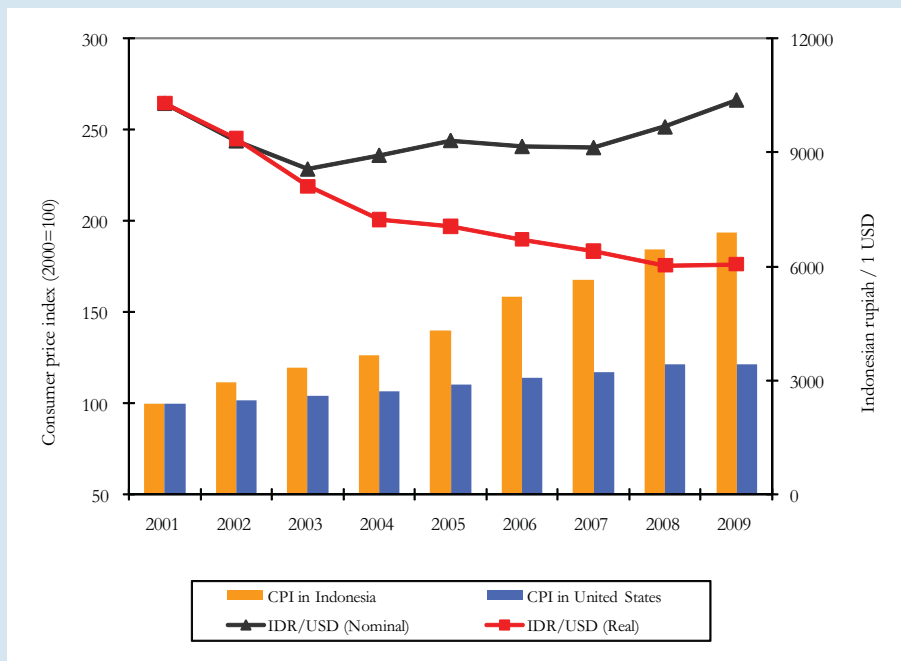
4 Bank Dunia (2010): *Indonesia Economic Quarterly: Continuity amidst volatility* (Jakarta).

5 Dhanani, D, Islam, I and Chowdhury, A *The Indonesian Labour Market: Changes and challenges*, (Routledge, London and New York, 2009).

6 Laporan ini menggunakan nilai tukar mata uang sebenarnya sebagai nominal nilai tukar dan rasio tingkat harga antara dua negara sebagai acuan.

persen selama delapan tahun (2001-2009). Hasil serupa dapat ditemukan dalam mata uang lainnya. Peningkatan biaya tenaga kerja dalam mata uang investor ini mungkin telah mengurangi investasi, yang kemudian mengurangi kapasitas penciptaan lapangan kerja dari perekonomian.

Gambar 1.6
Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat – Rupiah



Sumber: Database online Bank Indonesia dan Bank Dunia, *World Development Indicators*

Tabel 1.2
Upah Tenaga Kerja Produksi Indonesia di bawah Penyelia dalam Industri Pengolahan (manufaktur)

Tahun	2001	2009
Upah nominal dalam rupiah (000)	535	1.116
Upah nominal dalam dolar Amerika Serikat	52	107
Indeks Inflasi (Indeks harga konsumen <i>Consumer Price Index</i> /CPI) di Indonesia (2001=100)	100	196
Indeks upah riil (dalam rupiah (Juni 2001=100))	100	106

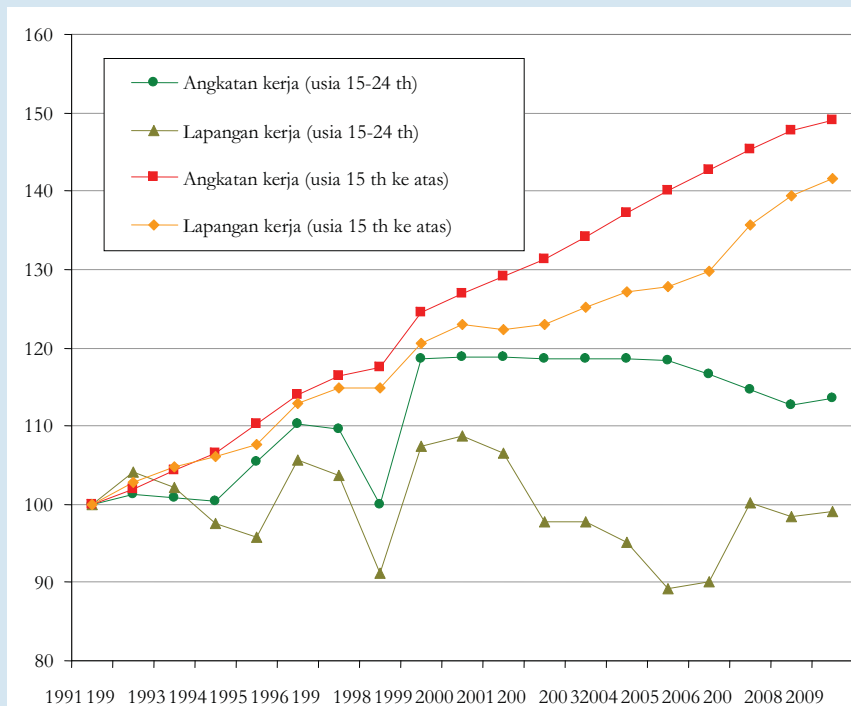
Sumber: Data upah Indonesia: BPS, Indeks Harga Konsumen: Badan Moneter Internasional (*International Monetary Fund* / IMF), kalkulasi penulis

1.2 Tren Pasar Tenaga Kerja

Pertumbuhan lapangan kerja setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1997/98 tertinggal dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja hingga tahun 2007 meskipun dengan adanya ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Angkatan kerja (di atas usia 15 tahun) terus meningkat sekitar 1,7 persen setiap tahun, antara tahun 2000 dan 2009, sedangkan laju pertumbuhan lapangan kerja (di atas usia 15 tahun) melambat setelah terjadinya krisis hingga akhirnya membaik di tahun 2007. Secara khusus, lapangan kerja bagi kaum muda (usia 15-24 tahun) terkena dampak krisis keuangan Asia jauh sebelum akhir tahun 1990-an. Tingkat lapangan kerja kaum muda di tahun 2009 berada di bawah tingkat yang tercatat pada tahun 1991, menyebabkan banyaknya pengangguran di kalangan muda. Tantangan yang dihadapi kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan sangat memprihatinkan di Indonesia, ditandai dengan tingginya angka pengangguran di kalangan muda, sebesar 22,2 persen di tahun 2009, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan (13,9 persen untuk Asia Tenggara dan Pasifik) dan rata-rata dunia (12,8 persen).⁷ Angka pengangguran lebih tinggi bagi kaum perempuan muda dibandingkan laki-laki, namun kesenjangan tersebut telah menyempit dalam beberapa tahun terakhir. Angka pengangguran di kalangan kaum muda antardaerah sangat berbeda: di Bali – Nusa Tenggara sebesar 10,8 persen, sedangkan di Banten sebesar 34,1 persen. Peluang kerja tampaknya sangat langka untuk lulusan SMP dan SMA.

Pertumbuhan lapangan kerja tertinggal dari pertumbuhan angkatan kerja

Gambar 1.7
Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Lapangan Kerja (indeks, 1991=100)



Sumber ILO, Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja Edisi ke-6; untuk 2009: BPS, Survei Angkatan Kerja

7 Sumber: ILO (2011) *Global Employment Trends*

*Kaum perempuan
mendapatkan
pekerjaan,
mempersempit
kesenjangan gender
dalam pekerjaan*

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, angka pengangguran (usia di atas 15 tahun, laki-laki dan perempuan) mencapai puncaknya pada 2005 dan mulai menurun dari 11,2 persen di tahun 2005, menjadi 8,4 persen di tahun 2008, dan selanjutnya turun menjadi 7,9 persen di tahun 2009, mencerminkan pertumbuhan lapangan kerja dalam pekerjaan non-upah. Laju penurunan angka pengangguran jauh lebih cepat di kalangan perempuan, yang mempersempit kesenjangan gender dalam hal tingkat pengangguran, dari 5,4 titik persentase pada tahun 2005 menjadi hanya 1,0 titik persentase pada tahun 2009. Kecenderungan ini merupakan hasil dari pertumbuhan lapangan kerja yang lebih kuat bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Bahkan jumlah perempuan yang memiliki pekerjaan meningkat sebesar 7,2 juta antara tahun 2005 dan 2009, hampir dua kali lebih besar ketimbang perolehan pekerjaan bagi laki-laki (3,7 juta) dalam periode yang sama. Dalam hal laju pertumbuhan lapangan kerja, pertumbuhan lapangan kerja rata-rata tahunan antara tahun 2005 dan 2009 sebesar 1,5 persen untuk laki-laki dan 5,1 persen untuk perempuan. Tampaknya pertumbuhan lapangan kerja yang pesat di sektor jasa berkontribusi kepada cepatnya laju pertumbuhan lapangan kerja bagi perempuan (Tabel 1.2).

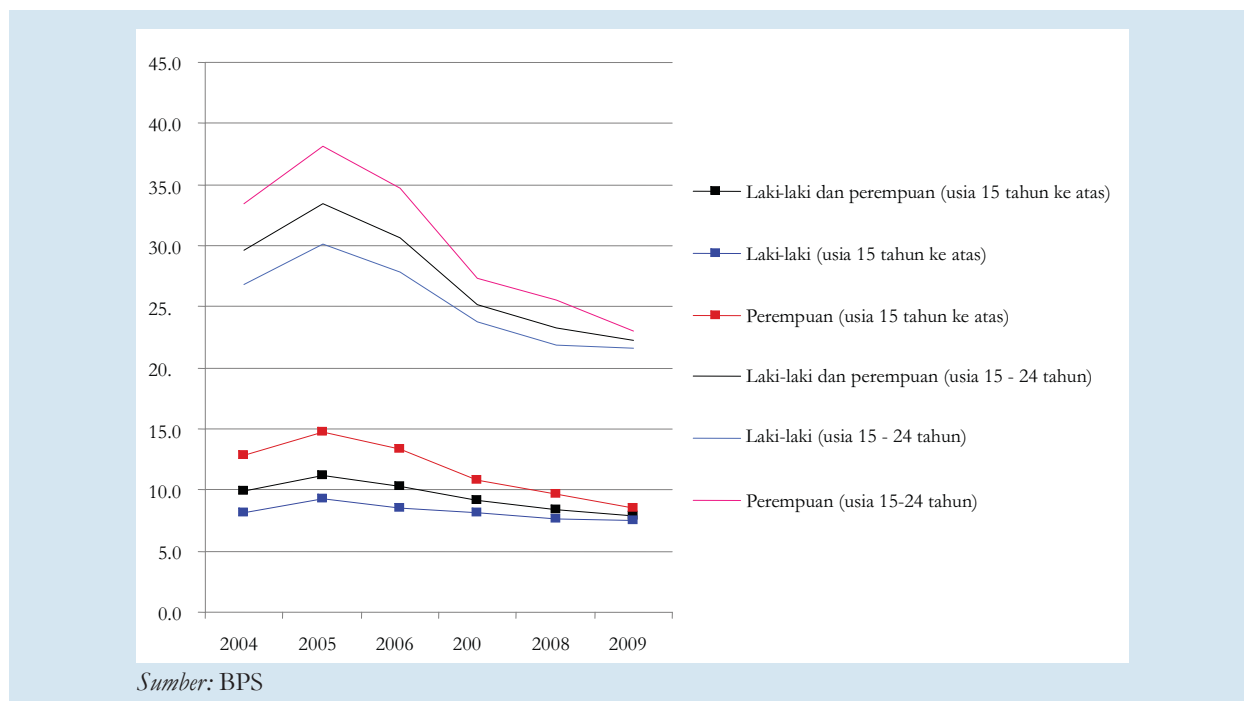
*Kaum muda
menghadapi
tantangan dalam
memasuki pasar
tenaga kerja*

Pengangguran kaum muda (usia 15 – 24 tahun) menurun secara signifikan sejak tahun 2005. Satu dari tiga pemuda yang aktif secara ekonomi keluar dari pekerjaan di tahun 2005 sedangkan rasio di tahun 2009 adalah satu dari 4,5 tenaga kerja muda. Pengangguran kaum muda berkurang sekitar 2,6 juta antara tahun 2005 dan 2009, yang mana jumlah pengangguran perempuan sebesar 1,5 juta dari angka tersebut. Pertumbuhan lapangan kerja bagi kaum perempuan yang lebih cepat (pertumbuhan lapangan kerja tahunan rata-rata sebesar 2,9 persen untuk laki-laki dan 3,8 persen untuk perempuan) mempersempit kesenjangan gender dalam angka pengangguran kaum muda dari 8,1 titik persentase di tahun 2005 ke 1,4 titik persentase di tahun 2009. Meskipun kecenderungan keseluruhan dari pengangguran kaum muda menurun, tenaga kerja muda (usia 15 – 24 tahun) masih sekitar 4,9 kali lebih mungkin untuk menjadi pengangguran dibandingkan para pekerja dari generasi yang lebih tua (usia 25 tahun ke atas) di tahun 2009. Sementara tingkat pengangguran untuk tenaga kerja berusia di atas 25 tahun sebesar 4,5 persen di tahun 2009, tingkat pengangguran pemuda (usia 15 – 24 tahun) sebesar 22,2 persen.

*Meningkatkan
kualitas
ketenagakerjaan
tetap menjadi sebuah
tantangan*

Seseorang tidak dapat menilai kinerja pasar tenaga kerja Indonesia hanya berdasarkan angka pengangguran karena indikator-indikator kualitas kerja mengungkapkan aspek penting lainnya dari tren ketenagakerjaan terbaru: kualitas kerja belum membaik seperti yang diharapkan dari penurunan yang cukup besar dalam pengangguran. Sebagai contoh, proporsi pekerjaan informal saat ini lebih tinggi daripada sebelum krisis keuangan Asia. Kondisi kerja yang kurang baik, rasa tidak aman dalam kerja dan kurangnya pertanggungjawaban asuransi sosial kerap menjadi ciri pekerjaan informal. Setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam

Gambar 1.8
Tingkat Pengangguran (persen)



seminggu) menurun tajam pada perempuan sementara pada laki-laki hanya terjadi perubahan tipis. Sekitar setengah pekerja yang bekerja tidak penuh (*underemployment*) diperkirakan masih mencari pekerjaan lain. Sebagai tambahan, kecenderungan dalam status ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proporsi pekerja musiman telah mengalami peningkatan, sedangkan kenaikan proporsi upah kerja antara tahun 2002 dan 2009 tidak mencolok. Penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan besar dalam kinerja pasar tenaga kerja berdasarkan provinsi. DKI Jakarta memiliki jumlah pekerjaan informal dan penduduk miskin terendah karena aktivitas ekonomi terpusat di ibu kota. Indikator-indikator kemiskinan dan pekerjaan informal cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi bagian timur Indonesia (Figur 1.12). Karenanya, mengalihkan pertumbuhan ekonomi menjadi perbaikan kualitas pekerjaan, tetap merupakan tantangan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 1.3
Pembagian Pekerjaan Informal dan Setengah Pengangguran (persentase total pekerjaan)

	Pekerjaan informal		Setengah pengangguran	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
1996	51,9	63,0	26,2	50,2
2002	60,4	68,3	24,7	43,6
2009	59,8	65,8	24,8	38,5

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja

Catatan: BPS mendefinisikan pekerjaan informal berdasarkan status pekerjaan dan aktivitas kerja (Lampiran 1). Setengah pengangguran merujuk kepada mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Tabel 1.4
Pembagian Pekerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan (persen)

	2002	2006	2009
Berusaha sendiri	19,2	20,4	20,1
Berusaha, dibantu pekerja tidak tetap/tidak dibayar	24,0	20,9	20,9
Berusaha, dibantu pekerja tetap/dibayar	3,0	3,0	2,9
Pekerja/pegawai	27,3	28,1	27,8
Pekerja bebas di pertanian	4,9	5,8	5,6
Pekerja bebas di non-pertanian	3,9	4,8	5,4
Pekerja tidak dibayar	17,6	16,9	17,3

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja

*Pergeseran
pekerjaan ke sektor
jasa telah mengubah
tuntutan keahlian
dan mempersempit
kesenjangan gender
di pasar tenaga
kerja*

Motor pertumbuhan perekonomian Indonesia telah bergeser sedikit demi sedikit dari pertanian dan industri pengolahan menjadi jasa seperti yang dibahas di Bagian 1-1 dan proporsi lapangan kerja di sektor ini secara umum menggambarkan pergeseran tersebut.

Ringkasnya, sektor pertanian dan industri mencatat tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata dari semua sektor, sebesar 5,6 persen per tahun antara tahun 2005 dan 2009, sedangkan pertumbuhan tinggi dicapai sektor jasa. Akibatnya, jumlah pekerjaan di sektor pertanian menurun sebesar 5,6 persen dari 45,3 persen di tahun 2000 menjadi 39,7 persen di tahun 2009. Penurunan jumlah pekerjaan di industri pengolahan tidak terlalu menonjol namun umumnya menurun 0,8 persen selama periode ini (Tabel 1.5). Secara keseluruhan, pergeseran sektor pekerjaan ini telah menyebabkan proporsi pekerja yang bekerja di sektor jasa saat ini lebih tinggi dibandingkan satu dasawarsa yang lalu.

Pergeseran pekerjaan ke sektor jasa mengakibatkan dua hal penting dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Pertama, hal tersebut telah mengubah tuntutan keterampilan perekonomian karena keterampilan yang lebih tinggi diperlukan untuk mendukung pengembangan sektor jasa. Seperti yang diperlihatkan laporan ini dalam bagian berikutnya, hasil pendidikan meningkat seperti yang dibuktikan oleh kesenjangan upah yang semakin lebar akibat pencapaian pendidikan pekerja. Akibat lainnya dari pertumbuhan pekerjaan di sektor jasa adalah cepatnya pertumbuhan pekerjaan di kalangan perempuan, yang mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja perempuan rata-rata bertumbuh 4,7 persen per tahun antara tahun 2004 dan 2009 dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Tingkat pertumbuhan tahunan dari penggunaan tenaga kerja perempuan dalam sektor transportasi dan komunikasi sebesar 24,7 persen selama periode yang sama. Keuangan, real estat, dan jasa juga mencatat pertumbuhan yang tinggi dalam penggunaan tenaga kerja perempuan. Sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan bagi perempuan di sektor jasa yang sedang berkembang, kesenjangan gender dalam tingkat partisipasi tenaga kerja, angka perbandingan pekerjaan terhadap populasi, dan upah menjadi jauh lebih kecil.

Tabel 1.5
Jumlah Pekerjaan Menurut Lapangan Kerja (persen)

Tahun	2000	2005	2009
Pertanian	45,3	44,0	39,7
Pertambangan dan Penggalian	0,5	1,0	1,1
Industri Pengolahan	13,0	12,7	12,2
Listrik, gas, dan air bersih	0,1	0,2	0,2
Bangunan	3,9	4,9	5,2
Perdagangan, restoran, dan hotel	20,6	19,1	20,9
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	5,1	6,0	5,8
Kuangan, asuransi, real estat, dan jasa perusahaan	1,0	1,2	1,4
Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan	10,7	11,0	13,4
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS

Menghubungkan proporsi sektor pekerjaan dalam PDB dan kesempatan kerja, menunjukkan intensitas tenaga kerja (atau modal) dari sektor tersebut pada satu titik (Tabel 1.5). Adalah jelas bahwa sektor pertanian merupakan sektor padat karya. 39,7 persen dari total tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian dan menghasilkan 13,6 persen dari total keluaran tahun 2009. Keuangan, real estat, dan jasa berada di ujung lain dari spektrum intensitas tenaga kerja/modal dari berbagai sektor. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang padat modal (atau padat pengetahuan) dan dengan demikian proporsi PDB relatif tinggi jika dibandingkan dengan proporsi penggunaan tenaga kerja. Secara umum, pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa menyiratkan total keluaran ekonomi yang lebih tinggi.

Keluaran dan kesempatan kerja yang didorong oleh sektor jasa

Gambaran lain muncul jika seseorang menghubungkan tingkat pertumbuhan keluaran dan pekerjaan berdasarkan sektor. Dengan membawa kurun waktu tertentu ke dalam analisis menghasilkan gambaran dinamis mengenai intensitas kerja dari pertumbuhan. Pertanian merupakan sektor padat karya di Indonesia jika dilihat dari gambaran statis; akan tetapi, intensitas kerja pertumbuhan dari sektor tersebut sangat rendah. Rata-rata, satu persen pertumbuhan keluaran dari sektor tersebut hanya menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja sebesar 0,13 persen. Dengan kata lain, sektor pertanian memperoleh produktivitas. Pertumbuhan di sektor komunikasi sangat padat modal karena investasi infrastruktur yang besar di sektor tersebut. Bagian lain dari sektor jasa mencatat elastisitas pekerjaan terhadap pertumbuhan keluaran (*output*) di atas rata-rata industri sebesar 0,40. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi sektor jasa beberapa tahun belakangan telah kondusif bagi pertumbuhan lapangan kerja.

Tabel 1.6
Proporsi dan Pertumbuhan Keluaran dan Lapangan Kerja Berdasarkan Sektor (PDB
berdasarkan harga konstan 2000)

	Proporsi sektor dalam PDB (2009, %)	Proporsi sektor dalam lapangan kerja (2009, %)	Rata-rata pertumbuhan keluaran tahunan (2004-2009, %)	Rata-rata pertumbuhan lapangan kerja tahunan (2004-2009, %)	Elastisitas ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan output (2004-2009)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	13,6	39,7	3,7	0,5	0,13
Pertambangan dan Penggalian	8,3	1,1	2,4	2,2	0,94
Industri Pengolahan	26,2	12,2	3,9	3,0	0,77
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,8	0,2	9,4	-0,5	-0,05
Bangunan	6,4	5,2	7,8	3,9	0,50
Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,9	20,9	6,3	2,8	0,44
Transportasi dan Komunikasi	8,8	5,8	14,6	2,2	0,15
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	9,6	1,4	6,7	5,7	0,86
Jasa	9,4	13,4	6,1	5,9	0,97
Semua Sektor	100,0	100,0	5,6	2,3	0,40

Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Tabel 1.7
Jumlah lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan berdasarkan sektor dan jenis kelamin

	Jumlah perempuan dalam pekerjaan	Rata-rata tahunan pertumbuhan lapangan kerja laki-laki (2004-2009, %)	Rata-rata tahunan pertumbuhan lapangan kerja perempuan (2004-2009, %)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	37,0	0,3	0,8
Pertambangan dan Penggalian	11,9	3,2	-3,6
Industri Pengolahan	43,8	1,6	5,0
Listrik, Gas, dan Air Bersih	9,4	-0,6	0,6
Bangunan	2,4	3,9	3,4
Perdagangan, Hotel dan Restoran	51,0	1,0	4,7
Transportasi dan Komunikasi	9,6	0,9	24,7
Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	29,4	4,5	9,2
Jasa	44,2	4,6	7,7
Semua Sektor	37,9	1,5	3,7

Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, pertumbuhan upah riil⁸ mengalami stagnasi atau bahkan menurun di beberapa sektor dan aktivitas pekerjaan antara tahun 2005 dan 2009. Upah riil untuk tenaga kerja produksi di bawah penyalah, misalnya, menurun lebih dari 10 persen antara bulan Maret 2005 dan September 2009, terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan konstan dalam upah minimum di seluruh Indonesia selama periode tersebut. Di permukaan, seseorang dapat menilai tren upah terhadap tingginya inflasi mengimbangi kenaikan upah nominal. Kendati demikian, di bawah permukaan, terbaring masalah struktural tentang rantai penghasilan yang keropos karena tingginya pekerjaan informal dan kurangnya perlindungan pendapatan.

*Daya beli upah
yang stagnan atau
menurun*

Adalah penting untuk mencatat tingginya kerentanan daya beli upah jika terjadi perubahan kebijakan secara mendadak dan guncangan eksternal. Dua hal pada Gambar 1.9 patut disebut. Pertama, penurunan yang tajam dalam upah riil sekitar sepuluh persen di paruh kedua tahun 2005 disebabkan adanya pemotongan subsidi bahan bakar dan diikuti dengan kenaikan harga.⁹ Meski penghapusan subsidi bahan bakar secara bertahap merupakan kebijakan untuk Indonesia, kehilangan upah riil yang tiba-tiba sebesar hampir sepuluh persen dalam tiga bulan jelas mengancam kesejahteraan para pekerja dan keluarga mereka, mengingat 60 persen dari populasi penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, sebesar dua dolar Amerika Serikat per hari di tahun 2007. Upah riil di tahun-tahun berikutnya tidak pernah pulih ke tingkat yang tercatat sebelum perubahan kebijakan tersebut. Kedua kehilangan upah riil yang terus-menerus di tahun 2008 terutama disebabkan oleh dampak negatif dari resesi global terhadap upah. Seiring dengan penurunan permintaan global serta semakin banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal, tekanan diletakkan pada upah. Di tahun 2009, upah riil perlahan-lahan membaik berkat meredanya inflasi dan pemulihan bertahap dari periode terburuk krisis.

Upah yang stagnan dan kerentanan upah riil terhadap guncangan dari luar mengungkapkan dua hal penting. Pertama, upah minimum ditetapkan berdasarkan biaya hidup di setiap provinsi, menjamin fleksibilitas dari standar pendapatan minimum. Kendati begitu, upah minimum tidak ditetapkan dengan baik karena 43,7 persen tenaga kerja masih menerima upah di bawah upah minimum di tahun 2009, sehingga gagal berfungsi sebagai rantai penghasilan. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak selalu menetes kepada pekerja kurang mampu, sebagian karena tekanan suplai tenaga kerja yang tinggi dan rantai pendapatan yang keropos. Kedua, tampak bahwa pasar tenaga kerja menyesuaikan terhadap guncangan dari luar dengan menurunkan upah riil dan mengurangi jam kerja¹⁰ ketimbang melakukan perampangan angkatan kerja karena pasar tenaga kerja Indonesia

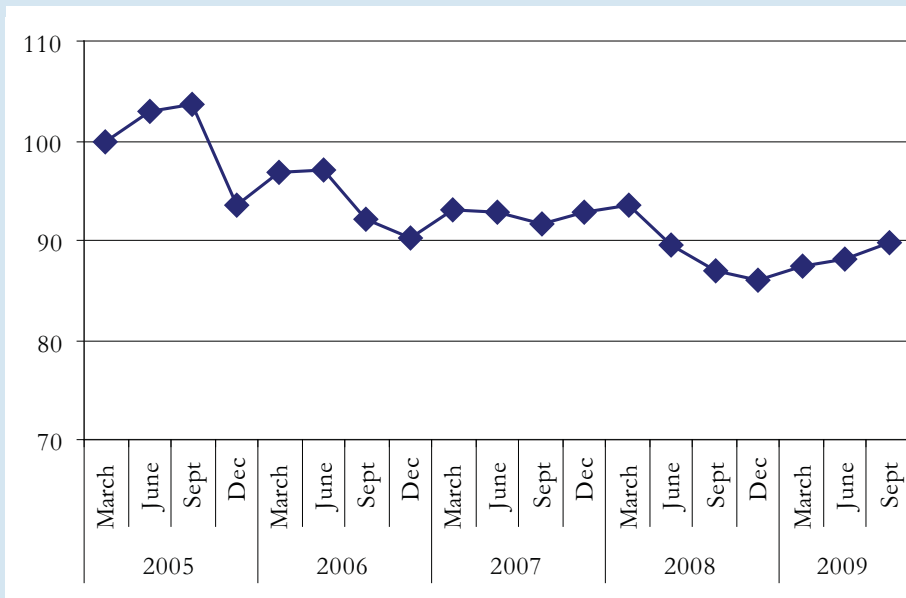
8 Upah nominal dikurangi laju inflasi

9 Harga naik, terutama harga makanan, memberikan dampak negatif kepada rakyat kurang mampu. Krisis pangan global di tahun 2008, misalnya, diperkirakan telah meningkatkan jumlah orang yang hidup sangat miskin hingga 100 juta jiwa. Lihat ILO (2011) *Global Employment Trends 2011*, Box 1, p. 25.

10 ILO (2010) Tinjauan Pakta Lapangan Kerja Global untuk Indonesia (Jenewa)

terus mengalami penurunan tren pengangguran di tengah resesi global, sementara upah riil turun.

Gambar 1.9
Indeks Upah Riil untuk Pekerja Produksi di bawah Penyelia (Maret 2005=100)

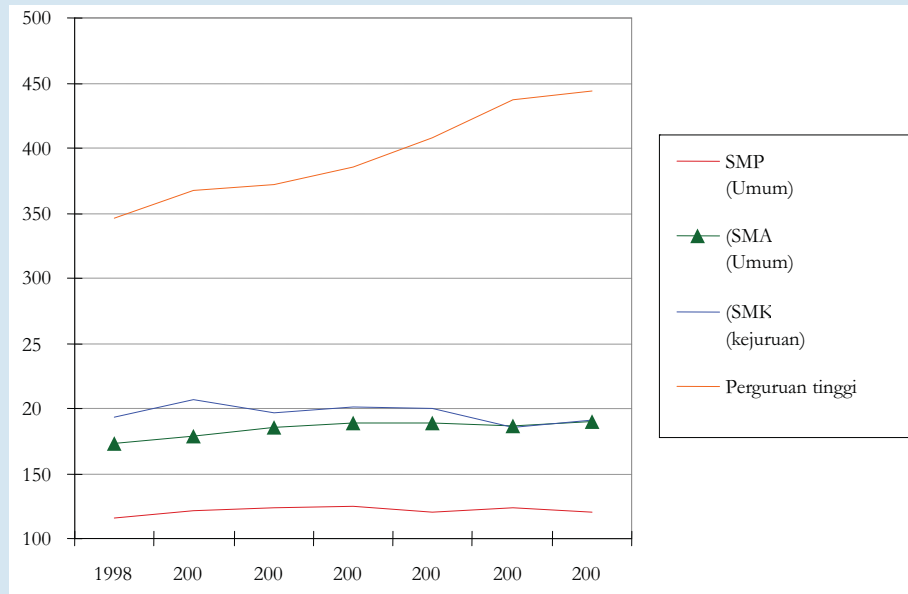


Sumber: BPS, *Quarterly Wage Statistics*

Pencapaian pendidikan semakin memperlebar kesenjangan upah

Tren lain yang menonjol dalam hal upah adalah meningkatnya hasil pada pendidikan perguruan tinggi. Upah per jam pekerja dengan gelar sarjana hampir 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan pendidikan dasar di tahun 1998. Kesenjangan ini semakin luas di dasawarsa terakhir, lulusan perguruan tinggi memperoleh penghasilan per jam 4,5 kali lebih besar dibandingkan pekerja dengan pendidikan dasar di tahun 2009. Seiring dengan berkembangnya sektor jasa dan menurunnya industri pengolahan padat karya, permintaan keterampilan telah bergeser, dengan mengutamakan pendidikan yang lebih tinggi. Kurangnya tenaga kerja terampil dan berlebihnya jumlah pekerja di Indonesia, menyebabkan kesenjangan upah menjadi semakin besar. Di satu sisi, tren upah ini menarik lebih banyak kaum muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan, jumlah tenaga kerja muda (usia 25 dan 30 tahun) dengan pendidikan perguruan tinggi telah mengalami kenaikan, khususnya di antara perempuan. Di sisi lain, tren upah ini mengkhawatirkan mengingat bahwa pendidikan perguruan tinggi tidak selalu terjangkau semua lapisan.

Gambar 1.10
Kesenjangan Upah Berdasarkan Pendidikan
 (upah untuk pekerja dengan pendidikan dasar =100)



Sumber : BPS, Survei angkatan kerja, Kalkulasi penulis

Pekerjaan produktif merupakan cara utama bagi sebagian besar tenaga kerja Indonesia untuk keluar dari kemiskinan. Meskipun pendidikan sangat menentukan akses kepada kesempatan tersebut, terlalu banyak anak-anak yang putus sekolah dan terjebak dalam kemiskinan. Survei Pekerja Anak Indonesia pertama di tahun 2009, mengungkapkan adanya 4,1 juta anak berusia 5-17 tahun dari 58,8 juta anak, bekerja rata-rata 25,7 jam per minggu. Lebih lanjut, 1,8 juta dari anak-anak yang bekerja ini dikategorikan sebagai pekerja anak. Sejumlah 6,7 juta anak dari golongan usia tersebut ternyata tidak bersekolah, tidak dalam pelatihan, dan tidak bekerja.

1,8 juta anak-anak putus sekolah dan terlibat dalam pekerjaan

Beban keuangan dari pendidikan merupakan alasan utama untuk tidak melanjutkan pendidikan. Menurut survei sosioekonomi (Susenas) di tahun 2007, 57,2 persen responden yang tidak pernah bersekolah atau putus sekolah menyebutkan alasan keuangan sebagai alasan untuk tidak menamatkan pendidikan. Biaya transportasi, buku pelajaran, seragam sekolah, dan perlengkapan sekolah tidak selalu terjangkau untuk semua keluarga. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), yang mewajibkan keluarga penerima untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang mencari peluang kerja di luar negeri, sebagian besar karena kurangnya lapangan kerja di sejumlah wilayah di Indonesia dan juga karena upah yang lebih tinggi di sejumlah negara lain. Berdasarkan statistik resmi, sekitar 4,3 juta pekerja migran Indonesia dipekerjakan di luar negeri, sekitar setengahnya (termasuk para pelaut) berada di negara tetangga, Malaysia. Kedekatan geografis dan

Meningkatnya migrasi tenaga kerja

kemiripan budaya termasuk bahasa dan budaya menyebabkan Malaysia menjadi negara tujuan terbesar. Arab Saudi merupakan negara tujuan bagi sekitar seperempat pekerja migran Indonesia. Mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan dan sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Selain pekerja migran yang terdokumentasi, ada sejumlah besar pekerja migran Indonesia yang tidak terdokumentasi. Karena sifatnya yang diam-diam, sulit untuk memperkirakan jumlah tenaga kerja migran yang tidak terdokumentasi tersebut.

Seiring dengan semakin banyaknya pekerja yang bekerja di luar negeri, perlindungan bagi pekerja migran muncul sebagai masalah penting. Pekerja migran tetap rentan terhadap penganiayaan dan pelanggaran hak-hak kerja di negara tujuan dan kondisi lebih buruk menimpa mereka yang tidak terdokumentasi. Perlindungan pekerja migran telah menjadi perhatian kebijakan di Indonesia.

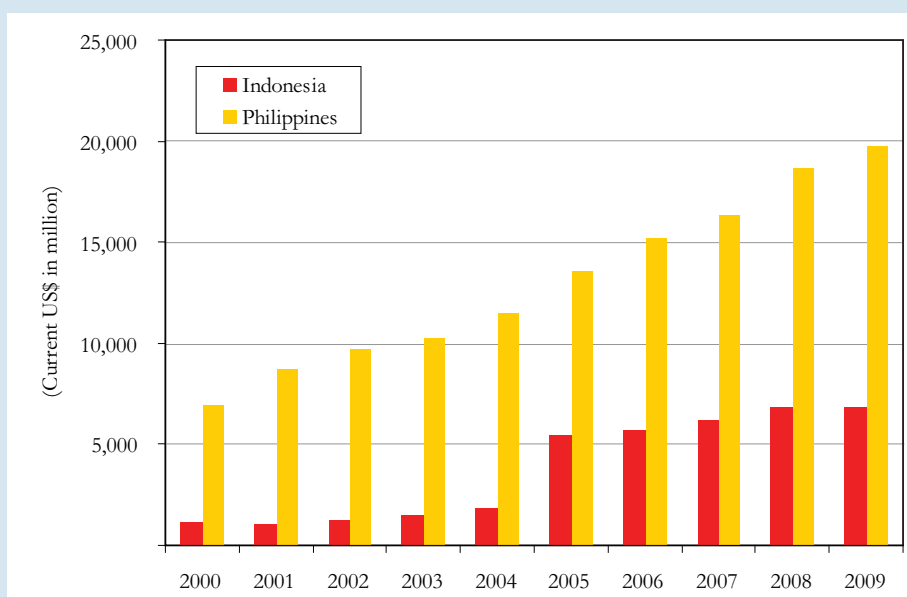
Peningkatan migrasi pekerja juga membawa peningkatan jumlah remitansi ke Indonesia. Jumlah uang yang dikirimkan pekerja migran meningkat tiga kali lipat antara tahun 2000 dan 2009. Jumlah uang kiriman yang dikirimkan ke Indonesia setara dengan 1,3 persen PDB Indonesia di tahun 2009. Karena sebagian besar remitansi tersebut dipakai untuk konsumsi, ILO membantu keluarga pekerja migran menggunakan remitansi untuk investasi yang produktif sehingga penghasilan mereka lebih stabil dan dampak positif dari migrasi kerja pada anggota keluarga berlangsung lebih lama.

Tabel 1.8
Jumlah Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Tujuan (ribu, 2009)

Negara		Negara	
Asia Pasifik		Timur Tengah	
Malaysia	2.000	Arab Saudi	960
Taiwan	130	Syria	80
Hong Kong, Cina	120	Uni Emirat Arab	75
Singapura	100	Kuwait	63
Jepang	44	Yordania	35
Brunei Darussalam	33	Lebanon	30
Korea Selatan	33	Qatar	25
Papua Nugini	25	Bahrain	16
Makau	25	Oman	12
Australia	20	Eropa	
Amerika		Belanda	15
Amerika Serikat	73	Jerman	13
Kanada	12	Pelaut	83
		Total	4.300

Sumber : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Gambar 1.11
Remitansi Tenaga Kerja dan Kompensasi yang Diterima



Sumber: World Databank, Bank Dunia

Menurut Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia akan mengalami pertumbuhan populasi yang sedang selama lima tahun ke depan, dengan sedikit penurunan dalam populasi muda (usia 15-24 tahun) dan peningkatan yang pesat dalam jumlah penduduk usia lanjut (usia di atas 60 tahun). Populasi usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Indonesia diproyeksikan mencapai kira-kira 181 juta di tahun 2014 (Tabel 1.9). Jumlah angkatan kerja akan mencapai sekitar 125 juta.

Proyeksi angkatan kerja 2014

Tabel 1.9
Proyeksi Angkatan Kerja

	Populasi tahun 2009 ('000)	Angkatan kerja tahun 2009 ('000)	Jumlah penggunaan tenaga kerja di bulan Agustus 2009 ('000)	Proyeksi populasi di tahun 2014 ('000)	Proyeksi Angkatan Kerja pada 2014 ('000)
Laki-laki					
Usia Muda (15-24 th)	21.874	13.134	10.291	20.578	13.251
Usia Dewasa (25-59 th)	53.860	51.903	49.508	58.179	56.079
Usia Lanjut (60 th ke atas)	8.440	5.372	5.323	10.735	7.892
Perempuan					
Usia Muda (15-24 th)	21.287	8.590	6.611	20.011	8.556
Usia Dewasa (25-59 th)	54.354	36.332	29.944	58.392	33.823
Usia Lanjut (60 th ke atas)	9.513	3.219	3.193	12.832	5.484
Total (15 th ke atas)	169.328	118.550	104.870	180.727	125.085

Sumber: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: the 2008 Revision; BPS, Labour force survei August 2009; ILO, LABORSTA Labour Statistics Database.

*Mencapai target
ketenagakerjaan
pada tahun 2014
membutuhkan
pertumbuhan
ekonomi yang tinggi*

Dalam rangka mencapai target dalam mengurangi tingkat pengangguran menjadi sekitar lima persen pada tahun 2014, Indonesia harus mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan intensitas pekerjaan, atau kombinasi keduanya. Untuk dapat mencapai target dibutuhkan, misalnya, pertumbuhan PDB tahunan sebesar 5,4 sampai 7,9 persen antara tahun 2009 dan 2014.¹¹ Karena dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lapangan kerja bervariasi, bergantung pada sejumlah faktor seperti campuran industri dan pertumbuhan intensitas pekerjaan, proyeksi ini menggunakan tiga angka yang berbeda dari elastisitas pekerjaan terhadap pertumbuhan PDB (0,35, 0,40 dan 0,45). Elastisitas pekerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi antara tahun 2004 dan 2008 sebesar 0,37. Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,0 sampai 6,3 persen di tahun 2011 dan 7,0 sampai 7,7 persen di tahun 2014.

Tabel 1.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Diperlukan (tahunan 2009-2014, %)

	Elastisitas pekerjaan sebesar 0,35	Elastisitas pekerjaan sebesar 0,40	Elastisitas pekerjaan sebesar 0,45
Tingkat pengangguran 5,5 % di 2014	6,92	6,06	5,38
Tingkat pengangguran 4,0 % di 2014	7,85	6,87	6,10

Sumber: Kalkulasi penulis

Target lapangan kerja dapat dicapai dengan mengatasi hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi dan dengan meningkatkan cakupan pertumbuhan ekonomi. Paruh kedua dari laporan ini akan memuat aspek-aspek ini.

11 Dengan besarnya proporsi perekonomian informal, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan lapangan kerja tidak terlihat jelas. Tingginya pertumbuhan ekonomi bisa jadi hanya mengalihkan tenaga kerja dari sektor-sektor yang tidak produktif ke sektor-sektor yang lebih modern dan produktif. Selain itu, berbagai faktor eksternal dan indigenus mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian. Karena itu, grafik-grafik dalam analisis ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati.

Kotak 1

Target 1B – MDG: Mencapai Pekerjaan yang Produktif serta Layak bagi Semua, Termasuk Perempuan dan Kaum Muda

Di bulan September 2000, para pemimpin dunia berkumpul dalam Konferensi Milenium PBB di New York dan menyetujui Deklarasi Milenium. Deklarasi tersebut menjalin kemitraan global yang baru dan berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dan menetapkan target-target yang terikat waktu yang kemudian dikenal sebagai Sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*). Tujuan 1 MDG untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim termasuk target untuk pekerjaan dan empat indikator pekerjaan.

Target 1B: Mencapai pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan kaum muda

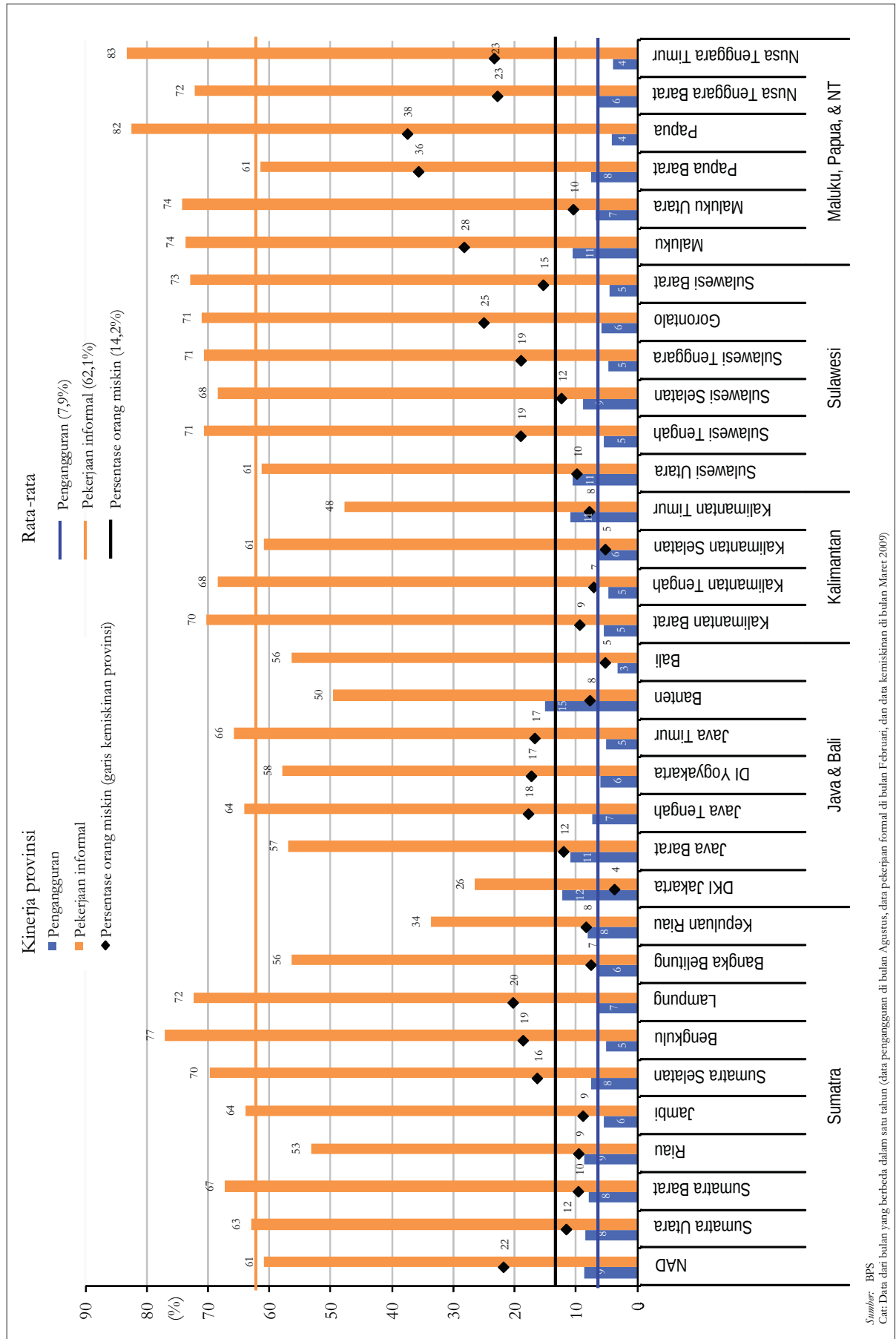
- Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (PDB per orang yang dipekerjakan)
- Rasio lapangan kerja terhadap populasi
- Jumlah orang yang bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan
- Jumlah pekerja yang bekerja sendiri dan pekerja keluarga dalam total pekerjaan

Seperti yang ditunjukkan Tabel 1.11, kemajuan Indonesia dalam mencapai target 1B menghasilkan gambaran yang bermacam-macam. Sementara penurunan dalam tingkat pekerja miskin dan tingkat pekerja mandiri atau pekerja rumah tangga (*vulnerable employment*) mengalami kemajuan yang besar sejak tahun 2000. Rasio lapangan kerja terhadap populasi dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja menurun selama periode yang sama. Secara umum, perempuan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pasar tenaga kerja seperti yang dibuktikan oleh rendahnya rasio lapangan kerja terhadap populasi dan tingginya tingkat pekerjaan rentan dibandingkan laki-laki.

Tabel 1.11
Target 1B MDG

Indikator	2000	2009
Laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (PDB per orang yang dipekerjakan)	3,7 % (1999-2000)	2,2% (2008-2009)
Rasio lapangan kerja terhadap populasi (usia 15-24 tahun)	Laki-laki 48,8% Perempuan 34,4% Total 41,5%	Laki-laki 47,0% Perempuan 31,1% Total 39,2%
Rasio lapangan kerja terhadap populasi (usia 15 tahun ke atas)	Laki-laki 79,4% Perempuan 48,2% Total 63,6%	Laki-laki 77,4% Perempuan 46,7% Total 61,9%
Jumlah orang yang bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan (definisi nasional)	27,1 % (Tahun 1999)	15,4 %
Jumlah pekerja yang bekerja sendiri dan pekerja rumah tangga dalam total pekerjaan (<i>vulnerable employment rate</i>)	Laki-laki 61,4% Perempuan 70,5% Total 64,9%	Laki-laki 61,8% Perempuan 67,0% Total 63,7%
Sumber: ILO, <i>Guide to the new Millennium Development Goals Employment Indicators</i> (2009); ILO, <i>KILM 6th edition</i> ; ADB's <i>Statistical Database System</i> ; The Conference Board <i>Total Economy Database</i> ; Kalkulasi penulis berdasarkan data BPS.		

Gambar 1.12 Tingkat Pengangguran, Pekerjaan Informal dan Kemiskinan (2009)



Mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja

2.1 Gambaran Singkat

Bagian kedua dari laporan ini mengembangkan diskusi ke depan tentang bidang-bidang kebijakan ketenagakerjaan dengan fokus khusus pada mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi penciptaan pekerjaan yang layak dan perbaikan kondisi kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menawarkan peluang-peluang untuk mengatasi berbagai masalah dalam pasar tenaga kerja karena reformasi yang diperlukan dapat diterapkan dengan lebih mudah selama terjadinya kenaikan dalam perekonomian. Indonesia telah menyusul peringkat negara-negara dengan penghasilan menengah dan kini saatnya bagi negara ini untuk memperkuat lembaga yang mendukung pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dan meningkatkan pekerjaan yang layak dan produktif serta pembangunan sosial.

Pakta Lapangan Kerja Indonesia sebagai sebuah kerangka kebijakan

Para pemimpin di pemerintahan, pekerja, dan pengusaha dunia bertemu di Jenewa pada Juni 2009 dan menyepakati portofolio kebijakan yang telah teruji dengan baik dan efektif dalam mengurangi dampak krisis global atas pasar tenaga kerja dan juga kondusif bagi pemulihan kondisi kaya-lapangan kerja. Diskusi dan kesepakatan di antara para perwakilan perekonomian riil ini dikristalisasi ke dalam persetujuan yang disebut Pakta Lapangan Kerja Global (*Global Jobs Pact*/GJP). Menindaklanjuti konsensus global ini, perwakilan konstituen ILO di Indonesia memutuskan pada pertemuan tripartit di bulan Februari 2010 untuk mengadaptasi GJP ke dalam konteks nasional dalam upaya mengatasi berbagai tantangan dalam pasar tenaga kerja Indonesia dan untuk membuat pertumbuhan ekonomi lebih kaya-lapangan kerja serta inklusif. Dengan demikian, mereka memulai sebuah proses untuk mengembangkan kerangka kebijakan dengan

memodifikasi GJP ke dalam konteks Indonesia. Komite pengarah untuk Pakta Lapangan Kerja Indonesia (*Indonesian Jobs Pact/IJP*) mengidentifikasi bidang-bidang prioritas berikut untuk aksi bersama:

1. Penciptaan lapangan kerja
2. Produktivitas tenaga kerja
3. Hubungan industrial
4. Perlindungan sosial

Bidang-bidang ini merupakan pilar IJP.

Bagian berikut akan membahas bidang prioritas IJP. Keempat bidang ini sangat relevan dengan tema utama dari laporan ini: mewujudkan pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja membutuhkan kebijakan yang luas dan keempat bidang prioritas IJP ini menawarkan unsur-unsur kunci untuk portofolio kebijakan seperti yang akan dibahas secara rinci dalam bagian berikut.

2.2 Penciptaan Lapangan Kerja

*Peningkatan fokus
pada pertumbuhan
inklusif dan pro-
masyarakat miskin*

Secara umum, prasyarat yang diperlukan bagi pertumbuhan pekerjaan adalah peningkatan dalam aktivitas ekonomi dan keluaran (*output*). Tentu saja seseorang dapat merujuk pembagian kerja atau pengurangan waktu kerja sebagai cara untuk menciptakan lapangan kerja di tengah tiadanya pertumbuhan output. Jerman, contohnya, menerapkan jalur kebijakan ini untuk mengurangi dampak krisis global terhadap ketenagakerjaan. Selanjutnya, ada beberapa kejadian di mana lapangan kerja dapat diciptakan dengan mengorbankan produktivitas. Contohnya, di negara berkembang dengan perekonomian agraria yang besar, sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja yang berlebihan ketika lapangan kerja berkurang di sektor lainnya. Reaksi pasar tenaga kerja Indonesia terhadap guncangan dari luar menggambarkan hal ini secara efektif. Di tengah krisis keuangan Asia, lapangan kerja di sektor pertanian di Indonesia mengalami peningkatan tanpa adanya peningkatan *output* yang besar. Hal ini dapat dilihat sebagai bagi hasil informal dalam arti luas. Karenanya, dalam hal penciptaan lapangan kerja, tujuan dari bagian ini adalah terfokus pada pengembangan pekerjaan yang produktif dan layak untuk memperoleh rekomendasi kebijakan yang berarti. Demikianlah, penulis menggunakan istilah pekerjaan dalam bagian ini dalam arti yang lebih sempit untuk merujuk kepada kualitas pekerjaan, kecuali jika dinyatakan secara khusus.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan pekerjaan produktif dan layak, namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu memperluas peluang kerja dan mengurangi kemiskinan. Seseorang dapat dengan mudah menyebutkan contoh pertumbuhan ekonomi yang gagal menghasilkan peluang kerja. Contohnya, sebuah perekonomian dengan ekspor komoditas yang besar mungkin mengalami

peningkatan PDB dengan meningkatnya harga komoditas tapi hal ini sering terjadi tanpa diikuti pertumbuhan dalam pekerjaan. Ini sebabnya mengapa para pembuat kebijakan dan peneliti semakin memberikan perhatian tidak hanya kepada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pola pertumbuhan yang juga pro-masyarakat miskin dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi pusat perhatian bagi banyak pembuat kebijakan dan peneliti. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak studi yang difokuskan kepada hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan dengan asumsi bahwa dengan mengatasi hambatan-hambatan kritis bagi pertumbuhan akan mengeluarkan potensi pertumbuhan ekonomi sehingga menuntun kepada pembangunan secara keseluruhan yang lebih baik. Banyak dari studi ini mengikuti kerangka diagnostik pertumbuhan yang dikembangkan oleh Hausmann, Rodrik, and Velasco.¹² Bank Pembangunan Asia (ADB) mengajukan kerangka konseptual pertumbuhan inklusif yang memadukan dua tujuan kebijakan, memperluas kesempatan ekonomi dan memberikan kesetaraan akses bagi warga negara terhadap kesempatan tersebut.¹³ ADB, ILO dan Bank Pembangunan Islam (IDB) menerapkan kerangka ini dalam analisis diagnostik pertumbuhan di Indonesia.¹⁴ Penelitian bersama ini mengidentifikasi (1) infrastruktur yang tidak mencukupi dan bermutu rendah, (2) kelemahan dalam pemerintah dan lembaga-lembaga, dan (3) akses yang tidak sama terhadap pendidikan dan mutu pendidikan yang rendah sebagai hambatan-hambatan kritis yang akan menghambat bangsa ini menikmati pembangunan yang lebih cepat dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan lebih inklusif jika hambatan-hambatan kritis bagi pertumbuhan diatasi

Kotak 2

Berbagi Praktik Terbaik untuk Meningkatkan Lingkungan Usaha

Dengan pemerintahan yang terdesentralisasi, peraturan usaha antara provinsi dan kota di Indonesia bisa bervariasi, menyebabkan adanya perbedaan dalam tingkat kemudahan dalam melakukan usaha. *Doing business in Indonesia 2010* membandingkan 14 kota besar Indonesia dalam hal kemudahan untuk memulai usaha, berurusan dengan izin konstruksi dan mendaftarkan properti. Kota-kota yang diikutsertakan dalam studi ini adalah: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Manado, Palangka Raya, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Surakarta dan Yogyakarta. Kota-kota dengan kinerja terbaik menyediakan lingkungan usaha kelas dunia ketika menyangkut jumlah prosedur dan waktu yang diperlukan untuk mengurus izin konstruksi. Namun demikian, kota-kota dengan kinerja terbaik di Indonesia sekalipun membutuhkan pengurangan biaya yang besar dan

12 Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco Growth Diagnostics. (Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2005)

13 ADB (2007) *Philippines: Critical development constraints*, (Manila)

14 ADB, IDB and ILO (2009) *Indonesia: Critical development constraints*, (Manila)

pengurangan waktu untuk memulai usaha sebelum kota-kota tersebut dapat berkompetisi di tingkat global (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Kemudahan Melakukan Usaha di Beberapa Kota Terpilih di Indonesia

Indikator	Kota dengan kinerja terbaik (peringkat global 183)	Kota dengan kinerja terburuk
Jumlah prosedur untuk mengurus izin konstruksi	Yogyakarta 8 prosedur (5)	Manado 15 prosedur
Jumlah hari yang diperlukan untuk mengurus izin konstruksi	Makassar 56 hari (9)	Surabaya 230 hari
Jumlah hari untuk mendaftarkan properti	Manado 12 hari (24)	Surakarta 54 hari
Jumlah hari untuk dapat memulai usaha	Yogyakarta and Bandung 43 hari (143)	Jakarta 60 hari
Biaya untuk memulai usaha	Jakarta 26% pendapatan per kapita (117)	Manado 38,3% pendapatan per kapita

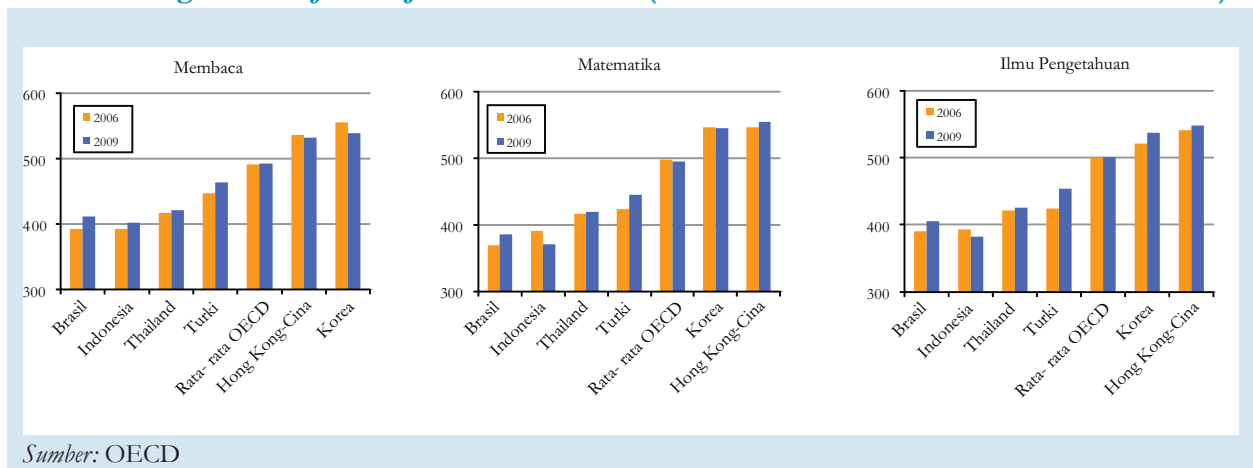
Sumber: Bank Dunia dan International Finance Corporation, Doing Business in Indonesia 2010

Pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif jika pendidikan ditingkatkan

Agar pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, adalah penting pertumbuhan tersebut mampu memacu penciptaan lapangan kerja dan para pekerja dalam posisi yang kurang menguntungkan di pasar tenaga kerja (misalnya pekerja miskin, pengangguran dan pekerja dengan kontrak tidak tetap) dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Ketika kapasitas para pekerja tersebut untuk mengakses lapangan kerja yang baru tercipta, hal ini menentukan ke-inklusif-an pertumbuhan ekonomi. Studi gabungan ADB-IDB-ILO yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa akses yang tidak sama terhadap pendidikan dan mutu pendidikan yang rendah menyebabkan ketidaksamaan dalam akses untuk peluang kerja produktif. Meskipun tingkat pendaftaran sekolah telah meningkat, khususnya untuk pendidikan dasar, daerah pedesaan dan provinsi miskin masih tertinggal. Beban keuangan pendidikan termasuk biaya transportasi ke dan dari sekolah menghalangi akses masyarakat miskin terhadap pendidikan sekunder dan

pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan Pasifik.¹⁵ Perbaikan fasilitas sekolah dan penempatan guru-guru yang berkualitas ke daerah-daerah terpencil dan pedesaan masih menjadi sebuah tantangan. Dengan penurunan industri pengolahan padat karya dan cepatnya pertumbuhan sektor jasa modern, pendidikan memberikan pengaruh besar dalam menentukan akses terhadap kesempatan upah kerja. Oleh karena itu, kesenjangan upah yang meningkat akibat pencapaian pendidikan dapat memperbesar ketimpangan distribusi penghasilan di Indonesia kecuali akses terhadap kesempatan pendidikan yang hilang diperbaiki.

Gambar 2.1
Perbandingan Kinerja Pelajar Internasional (hasil survei OECD PISA, 2006 dan 2009)



Selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan meningkatkan akses terhadap peluang kerja produktif, pengaturan kondisi makroekonomi yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja merupakan faktor kunci lainnya yang harus diperhitungkan. Kebijakan makroekonomi utama sebelum krisis di dunia ada untuk menjaga agar inflasi rendah dan stabil, menggunakan suku bunga kebijakan sebagai alat untuk mengontrol inflasi. Kebijakan moneter di banyak negara mengikuti pola ini dan Indonesia tidak terkecuali. Menyesuaikan kebijakan suku bunga (tingkat suku bunga Bank Indonesia di Indonesia) untuk menekan inflasi, bagaimanapun, tidak efektif di Indonesia dalam merespons inflasi akibat tekanan harga yang disebabkan pemotongan subsidi bahan bakar dan meningkatnya harga komoditas. Selain itu, suku bunga pinjaman yang tinggi meningkatkan biaya modal, membuat sulit untuk memulai atau memperluas usaha atau untuk berinvestasi dalam produktivitas (misalnya meningkatkan kinerja mesin, menerapkan teknologi modern dalam produksi). Tingginya biaya modal mungkin telah mengurangi kesempatan kerja.

Fokus tunggal kebijakan makroekonomi tentang inflasi telah dipertanyakan seiring dengan para pembuat kebijakan dan ekonomis terus belajar dari krisis global. Pemikiran yang muncul sebagai akibat dari refleksi atas fokus kebijakan selama dasawarsa terakhir adalah bahwa

Meninggalkan target inflasi yang kaku untuk mencakup target kebijakan yang lebih luas

15 ADB, IDB dan ILO, ibid.

kebijakan makroekonomi memerlukan banyak target.¹⁶ Dengan demikian, ILO berusaha untuk mendorong agenda yang menempatkan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak di pusat kebijakan makroekonomi dan sosial.¹⁷

Perdagangan dan ketenagakerjaan

Perdagangan eksternal memiliki dampak penting bagi penciptaan dan kehilangan lapangan kerja di Indonesia. Ekspor yang lebih tinggi menuntun pada penciptaan lapangan kerja secara langsung di industri ekspor dan secara tidak langsung melalui hubungan timbal-balik antara sektor-sektor terkait. Sebaliknya, lebih banyak impor mungkin mengurangi lapangan kerja di Indonesia. Seiring dengan integrasi ekonomi yang semakin dalam di ASEAN dan volume perdagangan meningkat melalui perjanjian perdagangan bebas, memantau dan menilai dampak dari perdagangan terhadap ketenagakerjaan memberikan pengetahuan yang sangat diperlukan untuk pembuatan kebijakan pasar tenaga kerja.

Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) memungkinkan analisis hubungan perdagangan-output-ketenagakerjaan dan saluran transmisi. ILO mengkaji dampak dari persetujuan perdagangan bebas antara Indonesia dan Cina (yaitu pengurangan tarif) terhadap ketenagakerjaan di Indonesia, menggunakan data perdagangan tahun 2008. Cina merupakan mitra dagang besar untuk Indonesia karena 9,6 persen ekspor Indonesia ditujukan ke Cina dan 15,3 persen impor berasal dari negara tersebut di tahun 2009. Indonesia mengekspor bahan bakar mineral, pelumas dan karet ke Cina serta mengimpor mesin dan peralatan transportasi dari Cina. Karena ekspor Indonesia berasal dari sektor padat karya sementara impor lebih padat modal, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan peningkatan lapangan kerja¹⁸ berkat adanya pengurangan tarif. Terkait penciptaan lapangan kerja berdasarkan sektor, pengamatan lebih dekat pada hasil pengkajian menunjukkan bahwa peningkatan lapangan kerja terkonsentrasi di sektor pertanian sementara penurunan lapangan kerja terjadi di sektor industri olahan. Adalah penting untuk mencatat dampak hilangnya lapangan kerja tidak tersebar secara merata di antara kelompok pekerja. Kehilangan pekerjaan terjadi di sektor yang banyak mempekerjakan perempuan sementara impor berimbas pada tekstil yang merugikan lapangan kerja pemuda. Berdasarkan wilayah geografis, lebih banyak lapangan kerja tercipta di daerah pedesaan berkat adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, sementara daerah perkotaan mengalami penurunan lapangan kerja.

16 Blanchard, Olivier et.al Rethinking macroeconomic policy, SPN/10/03, (IMF,2010).

17 Lihat ILO (2003) *Global Employment Agenda*, (Geneva). Posisi ini tetap dipertahankan dalam Pakta Lapangan Kerja Global.

18 Berbagai hambatan non-tarif mungkin dapat mempengaruhi dampak ketenagakerjaan dari perdagangan.

Tabel 2.2
Estimasi Perolehan dan Kehilangan Pekerjaan Penuh Waktu Akibat Perjanjian
Perdagangan Bebas dengan Cina (sektor-sektor terpilih, 2008)

Sektor	Perolehan pekerjaan (ekspor)	Kehilangan pekerjaan (impor)
Tanaman	31.780	40.006
Pertanian lainnya	164.622	32.350
Tekstil, pakaian jadi, garmen dan kulit	18.542	51.265
Kertas, percetakan, transportasi, produk metal, dan industri lainnya	7.664	23.922
Jasa perdagangan	30.222	49.506
Pemerintah, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya	11.097	14.728
Sektor lainnya	329.725	302.279

Sumber: Ernst and Peters¹⁹

Kotak 3. Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)

SNSE mencatat semua transaksi ekonomi dalam rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, sehingga mampu menyediakan sebuah kerangka untuk mendokumentasi dan menganalisa struktur sosio-ekonomi dari sebuah perekonomian. SNSE ini menyatukan – antara lain – informasi mengenai input dan output mengenai produksi, konsumsi rumah tangga, subsidi pemerintah untuk produksi dan lembaga, remitansi pekerja, ekspor, dan impor. Sebuah matriks perhitungan sosial memiliki kemampuan untuk menjelaskan saluran-saluran interaksi dan transmisi antara variabel-variabel makro, seperti guncangan dari luar dan kebijakan publik, melalui sebuah kerangka analisa multisektoral yang mencakup pertimbangan-pertimbangan ketenagakerjaan dan distribusi penghasilan.

SNSE merupakan alat yang berguna bagi para pembuat kebijakan dalam memperkirakan dampak kebijakan. Namun demikian, SNSE juga memiliki keterbatasan teknis. SNSE umumnya mencakup data selama setahun, yang berarti bersifat statis dan merefleksikan masa lalu. SNSE juga menyatakan secara tidak langsung kondisi-kondisi koefisien tetap dan tidak menjadi agen perubahan perilaku. Karenanya, hasil perkiraan SNSE perlu diterjemahkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perubahan perilaku.

¹⁹ Ernst dan Peters, FTA Indonesia-China: what is the impact on employment, A DySAM analysis (tidak diterbitkan)

*Sebuah mitos
tentang peraturan
pasar tenaga kerja
dan ketenagakerjaan*

Beberapa pengamat pasar tenaga kerja memperdebatkan bahwa peraturan pasar tenaga kerja yang kaku meningkatkan biaya penyesuaian terhadap fluktuasi permintaan, serta mengurangi hasrat para pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja. Temuan penelitian beberapa tahun terakhir, bagaimanapun, mematahkan argumen ini. Di tahun 1990-an tingginya pengangguran di Eropa melahirkan perbedaan yang nyata dengan besarnya pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat. Akibatnya, banyak peneliti mengaitkan perbedaan dalam hal pertumbuhan lapangan kerja ini dengan peraturan pasar tenaga kerja. Akan tetapi, setelah melakukan penelitian selama beberapa tahun, *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mengungkapkan bahwa kekakuan pasar tenaga kerja tidak secara signifikan mempengaruhi pengangguran seperti terlihat secara statistik.²⁰ Bahkan jika kita membandingkan pasar tenaga kerja Eropa dan Amerika Serikat saat ini, keduanya memiliki tingkat pengangguran yang tinggi sekitar sepuluh persen terlepas dari perbedaan yang besar dalam hal peraturan pasar tenaga kerja.

Terdapat juga beragam bukti terkaitan dampak peraturan tenaga kerja terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Sejumlah peneliti percaya bahwa peraturan ketenagakerjaan yang kaku seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar, upah minimum, dan perlindungan bagi pekerja dari pemecatan menghalangi investasi dan mengurangi penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, pernyataan ini sering tidak didukung oleh bukti yang ada. Menurut sebuah survei pendapat eksekutif yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia, kekakuan ketenagakerjaan tidak termasuk ke dalam lima besar tantangan dalam melakukan bisnis di Indonesia.²¹ Selain itu, sebuah survei iklim investasi²² yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menggemakan penemuan Forum ini. Survei ini menyebutkan ketidakstabilan makroekonomi, transportasi dan korupsi sebagai tiga besar hambatan sementara peraturan tenaga kerja berada di peringkat ke-11. Jadi, para pengusaha dan investor tidak mungkin melepaskan kesempatan usaha semata-mata karena peraturan tenaga kerja yang kaku. Kendati demikian, Forum Ekonomi Dunia menemukan bahwa pasar tenaga kerja Cina hampir sekaku pasar tenaga kerja Indonesia.²³ Karenanya, kekakuan pasar tenaga kerja tidak dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam investasi, penciptaan kerja dan pengurangan kemiskinan di dua negara tersebut. Di sisi lain, para pengamat memang merujuk pada praktik di mana perusahaan mengabaikan peraturan ketenagakerjaan dengan mempekerjakan pekerja musiman atau pekerja kontrak, untuk menghindari biaya yang dibebankan oleh peraturan tersebut. Alhasil, terlihat bahwa peraturan ketenagakerjaan mempengaruhi mutu lapangan kerja dibandingkan jumlah lapangan kerja di Indonesia.

20 OECD (2004) *Employment Outlook 2004* (Paris).

21 World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2009-2010*

22 LPEM-FEUI (2007), *Investment Climate Monitoring. Round IV*, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial, Universitas Indoensia, (Jakarta).

23 Forum Ekonomi Dunia (2010) *The Global Competitiveness Report 2010-2011* (Jenewa).

Apakah peraturan ketenagakerjaan mengarah pada perekonomian informal yang lebih besar dan tingkat pekerjaan informal yang lebih tinggi? Lagi-lagi, bukti empiris tidak mendukung pandangan ini. Sebuah studi²⁴ yang dilakukan oleh La Porta dan Shleifer menggunakan pengukuran objektif dari ukuran perekonomian informal²⁵ untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keinformalan perekonomian. Analisa mereka memasukkan biaya-biaya untuk memenuhi peraturan ketenagakerjaan²⁶ sebagai suatu faktor. Hasilnya menegaskan bahwa tingkat pembangunan negara dalam hal PDB per kapitalah, dan bukan kekakuan pasar tenaga kerja, yang sebagian besar menentukan ukuran dari perekonomian informal. Bahkan ketika PDB per kapita dikendalikan, peraturan tenaga kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap perekonomian informal. Menurut hasil mereka, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran dari perekonomian informal, ketika PDB per kapita dikendalikan, termasuk akses kepada modal, infrastruktur (yaitu jalan aspal), total tingkat pajak, dan birokrasi (yaitu waktu yang digunakan para manager untuk memenuhi perpajakan dan jumlah prosedur yang diperlukan untuk memulai usaha secara legal)

Sebuah mitos tentang peraturan pasar tenaga kerja dan perekonomian informal

Sumber daya manusia (*human capital*) merupakan faktor kunci dalam penciptaan lapangan kerja karena, pada tingkat yang paling mendasar, serangkaian keterampilan yang tepat memungkinkan orang untuk membuka jalan kepada potensi ekonomi mereka. Kesuksesan pariwisata di Bali merupakan contoh yang bagus untuk menggambarkan hal ini. Bali merupakan tujuan wisata yang paling terkenal di Indonesia. Pulau yang kaya budaya ini menarik sekitar 16.500 wisatawan per hari di tahun 2009. Pariwisata menghasilkan kesempatan kerja dan penghasilan bagi penduduk lokal. Hotel-hotel sendiri saja, misalnya, mempekerjakan sekitar 29.000 pekerja di tahun 2009. Sulit untuk membayangkan bahwa empat dasawarsa yang lalu, pulau ini hanya memiliki satu hotel bintang lima dan serta tidak menarik banyak wisatawan.

Pengembangan sektor dan penciptaan lapangan kerja melalui keterampilan

Berbagai usaha termasuk pembangunan pariwisata dan pemasaran telah mengubah pulau tersebut menjadi tujuan wisata yang besar. Penting untuk mencatat bahwa pengembangan keterampilan untuk sektor perhotelan dan pariwisata memegang peran kunci dalam proses ini. Lembaga-lembaga pelatihan perhotelan berijazah di Bandung dan Bali telah melatih para manager dan pekerja perhotelan, mendorong pertumbuhan yang cepat di

24 La Porta, Rafael and Andrei Shleifer *The Unofficial Economy and Economic Development* NBER Working Paper No. 14520 (Cambridge, MA, 2008)

25 Pengukuran objektif seperti pengelakan pajak, jumlah pekerjaan bebas, perkiraan ukuran dari perekonomian informal berdasarkan konsumsi listrik dan juga jumlah perusahaan yang terdaftar per seribu orang penduduk.

26 Studi ini menggunakan tiga indikator berikut untuk menangkap kesesuaian biaya dengan hukum tenaga kerja: 1) indeks kesulitan dalam mempekerjakan tenaga kerja baru; 2) indeks kesulitan dan biaya untuk memecat pekerja yang berlebihan; dan 3) biaya tenaga kerja non upah seperti pajak penghasilan dan pembayaran jaminan sosial yang berhubungan dengan mempekerjakan karyawan baru sebagai persentase dari upah tenaga kerja.

industri pariwisata. Kedua lembaga tersebut awalnya dibantu oleh mitra kerjasama teknis dari luar negeri dan terus menjaga hubungan erat dengan industri perhotelan dan pariwisata. Contoh ini menggambarkan kontribusi dari pelatihan keterampilan dalam pengembangan sektor dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan ekonomi lokal dapat dipercepat jika para tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mengintegrasikan sebuah kebijakan pengembangan keterampilan pada rencana-rencana pengembangan kawasan dan sektor.

*Meningkatkan
pengaruh
ketenagakerjaan
dari belanja negara*

Selain penciptaan lapangan kerja di sektor swasta, belanja negara juga merupakan sumber penting bagi lapangan kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memaksimalkan pengaruh ketenagakerjaan dari belanja negara seluas mungkin. Pemerintah Indonesia dengan cepat merespons dampak resesi global yang sudah diperkirakan dengan menerapkan paket stimulus sebesar Rp 73,3 triliun (8,2 milyar dolar Amerika Serikat), kira-kira 1,4 persen dari PDB, sebagai salah satu tindakan. Lebih dari tiga perempat dari paket stimulus tersebut disalurkan melalui berbagai macam potongan pajak, yang relatif menguntungkan rumah tangga berpenghasilan tinggi. Dari paket Rp 73,3 triliun, sebesar Rp 12,2 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan bebas hambatan, pelabuhan, jembatan, dan sistem irigasi, yang menciptakan sekitar satu juta pekerjaan sementara di wilayah pedesaan. Dengan tambahan alokasi anggaran, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan pelatihan kerja tambahan bagi sekitar 50.000 pencari kerja di seluruh negeri.

2.3 Produktivitas Tenaga Kerja

*Mitos dan
fakta tentang
produktivitas tenaga
kerja*

Sebagian percaya bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja mengarah pada pengurangan lapangan kerja karena, secara intuitif, semakin tinggi produktivitas pekerja berarti lebih sedikit pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah *output* yang sama, mengakibatkan sebagian jumlah tenaga kerja menjadi berlebihan. Namun, teori-teori ekonomi dan bukti empiris yang ada, menyatakan sebaliknya. Produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan lapangan kerja dan upah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, meningkatkan produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang menguntungkan bagi para pekerja secara keseluruhan.

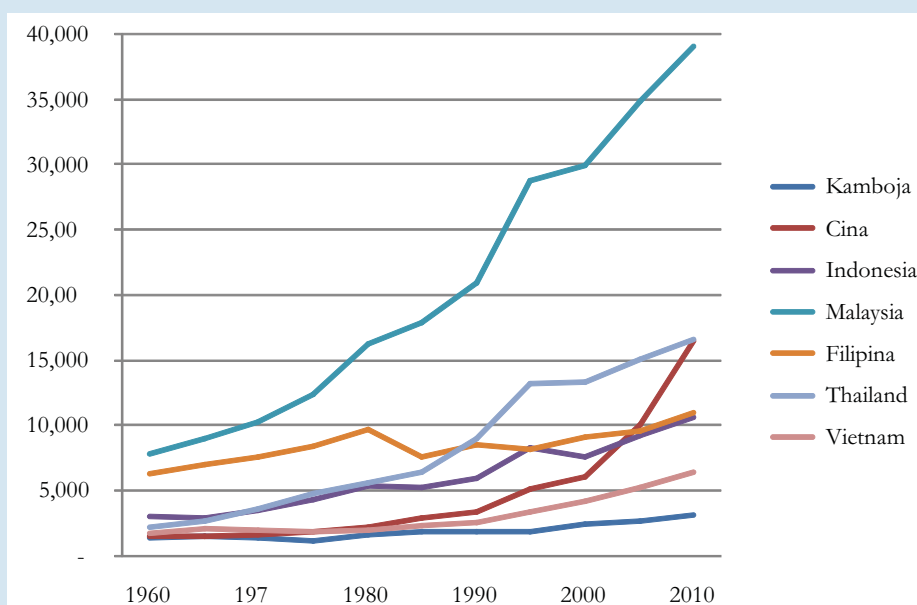
Penjelasan yang paling sederhana mengapa mitos mengenai produktivitas tenaga kerja membahayakan bagi ketenagakerjaan adalah tidak benar, yaitu bahwa perusahaan yang produktif akan memperoleh pangsa pasar. Dengan perusahaan yang produktif, seseorang tidak perlu mengasumsikan batas dari jumlah barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, dalam sebuah pasar yang kompetitif, perusahaan yang memaksimalkan keuntungan akan terus mempekerjakan tenaga kerja selama produktivitas

marjinal tenaga kerja melebihi upah riil. Jika diasumsikan bahwa kondisi lain adalah tetap, sebuah perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja ketika produktivitas tenaga kerja lebih tinggi. Penjelasan lain adalah, meskipun lebih rumit, bahwa semakin tingginya pertumbuhan produktivitas tenaga kerja mengarah pada tingkat pengangguran yang tidak meningkatkan inflasi yang lebih rendah (*non-accelerating inflation rate of unemployment /NAIRU*), serta tingkat keseimbangan jangka panjang pengangguran. Jadi, secara keseluruhan teori-teori ekonomi yang berlaku dan bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja menciptakan lebih banyak kesempatan dalam hal lapangan kerja dan upah.

Produktivitas kerja di Indonesia telah meningkat sejak 1960 dengan di sejumlah rentang waktu terjadi kelambatan pertumbuhan produktivitas. Kenaikannya hampir menyamai Filipina. Peningkatan produktivitas Indonesia selama lebih lima dasawarsa, sayangnya, tidak terbilang tinggi untuk cepatnya pertumbuhan Asia. Keberhasilan Thailand mendorong industrialisasinya jauh meninggalkan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Cina meningkat di tahun 1990-an dan secara signifikan meningkatkan produktivitas kerja selama dasawarsa terakhir. Nilai tambah per tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia lebih tinggi dari rata-rata beberapa negara lain dalam Gambar 2.3.

Indonesia berjalan relatif baik di regional

Gambar 2.2
Produktivitas Tenaga Kerja per Orang yang Dipekerjakan
(di tahun 2010 US dolar pada PPP/keseimbangan daya beli)



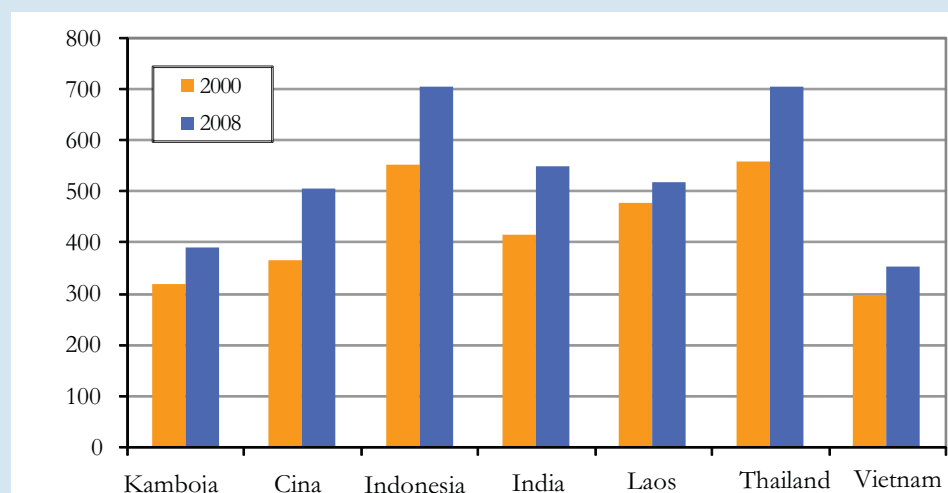
Sumber: The Conference Board Total Economy Database

Tabel 2.3
Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Tahunan (persen)

	Kamboja	China	Indonesia	Malaysia	Filipina	Thailand	Vietnam
1961-1970	0,22	2,90	1,12	2,50	1,61	4,95	0,71
1971-1980	2,47	2,74	4,02	4,28	2,21	4,28	-0,12
1981-1990	1,19	4,18	0,39	2,35	-1,07	5,04	2,78
1991-2000	2,63	5,65	1,67	3,03	1,11	2,89	4,61
2001-2010	3,52	9,46	3,11	2,71	2,32	2,26	4,04

Sumber: The Conference Board Total Economy Database

Gambar 2.3
Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja (konstan 2000 dollar AS)

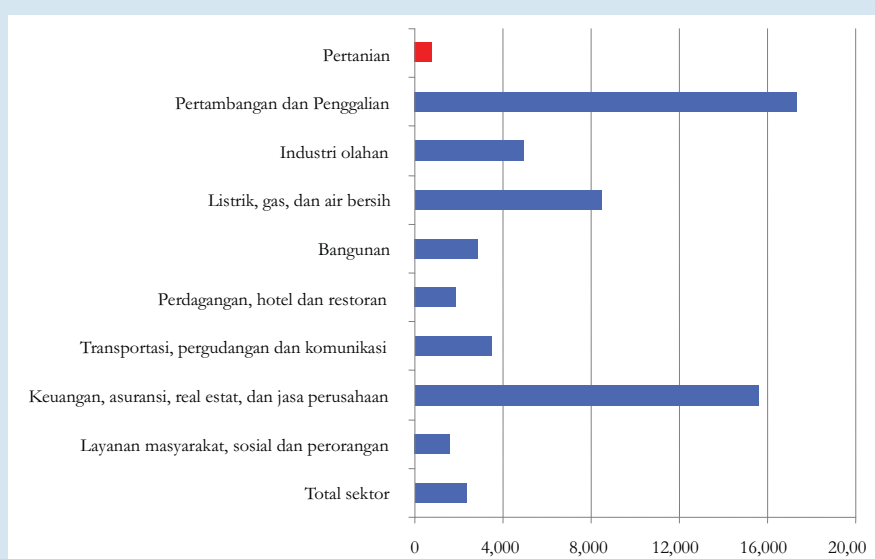


Sumber: Bank Dunia, World Databank

Produktivitas tenaga kerja berdasarkan sektor

Secara keseluruhan, peningkatan produktivitas tenaga kerja bisa diperoleh dengan mengalihkan tenaga kerja dari pertanian di mana produktivitasnya rendah dan terdapat kelebihan tenaga kerja ke sektor lain. Produktivitas tenaga kerja, yang diukur lewat PDB per tenaga kerja, terendah berada di sektor pertanian, yaitu sekitar seperempat dari rata-rata produktivitas tenaga kerja di semua sektor, kecuali pertanian, pertambangan dan penggalan. Sektor pertanian mempekerjakan 39,7 persen tenaga kerja di tahun 2009, tetapi sektor tersebut menunjukkan gejala kelebihan tenaga kerja, seperti rata-rata jam kerja yang pendek, produktivitas yang rendah serta upah yang rendah. Meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kelebihan tenaga kerja di sektor tersebut, dan menyerap tenaga kerja di sektor lain merupakan langkah yang paling memungkinkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan upah yang lebih tinggi bagi para pekerja. Pertumbuhan dari sektor non-pertanian dan pengembangan keterampilan yang diperlukan merupakan prasyarat sehingga pengalihan tersebut bisa terjadi tanpa merusak kondisi kerja di sektor lain.

Gambar 2.4
PDB per Tenaga Kerja per Sektor (berdasarkan harga konstan 2000, dolar AS, 2009)

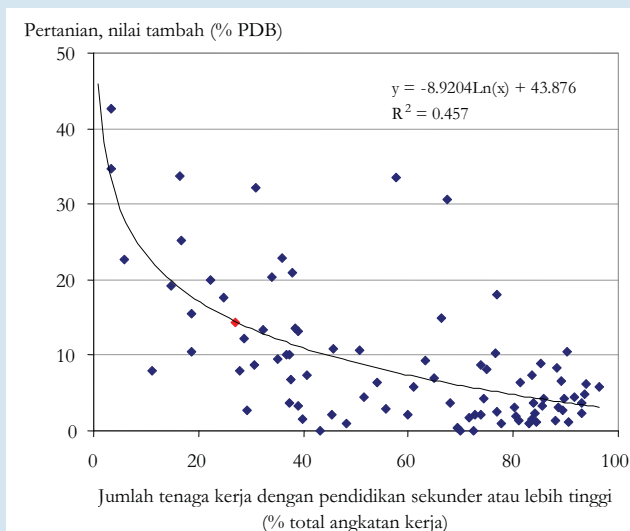


Sumber: BPS

Pertumbuhan sektor-sektor non pertanian membutuhkan kondisi-kondisi tertentu untuk dipenuhi. Salah satu kondisi tersebut menyangkut tingkat keterampilan tenaga kerja. Secara umum, sektor-sektor sekunder dan tersier menuntut keterampilan yang lebih tinggi daripada sektor primer. Dalam hal ini, ketersediaan tenaga kerja terampil merupakan faktor yang sangat penting untuk pengalihan struktural dari perekonomian berbasis pertanian, di mana eksploitasi sumber daya alam menjadi sistem produksi yang lebih padat modal dan padat pengetahuan. Gambar 2.5 menggambarkan andil pertanian dalam PDB dan tingkat keterampilan tenaga kerja dari 77 negara di mana ada ketersediaan data. Grafik tersebut menunjukkan korelasi negatif yang jelas antara kedua variabel tersebut. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah tenaga kerja terampil, semakin besar jumlah sektor sekunder dan tersier di dalam perekonomian.

Keterampilan yang mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor non pertanian dan produktivitas tenaga kerja

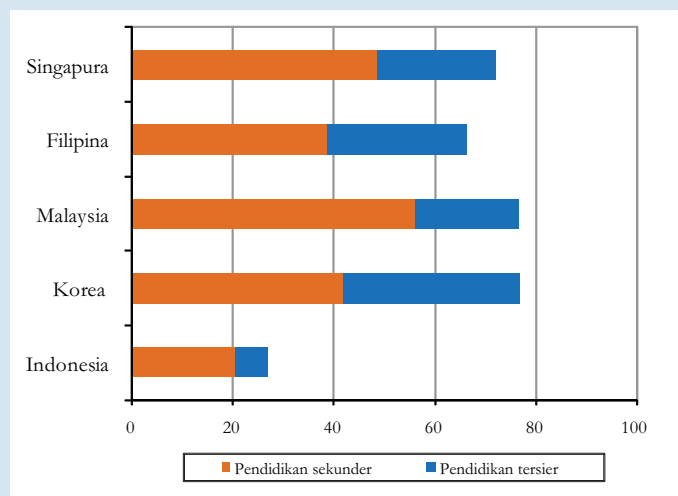
Gambar 2.5
Andil keterampilan dan pertanian dalam PDB



Sumber : Bank Dunia, *World Databank*, kalkulasi penulis

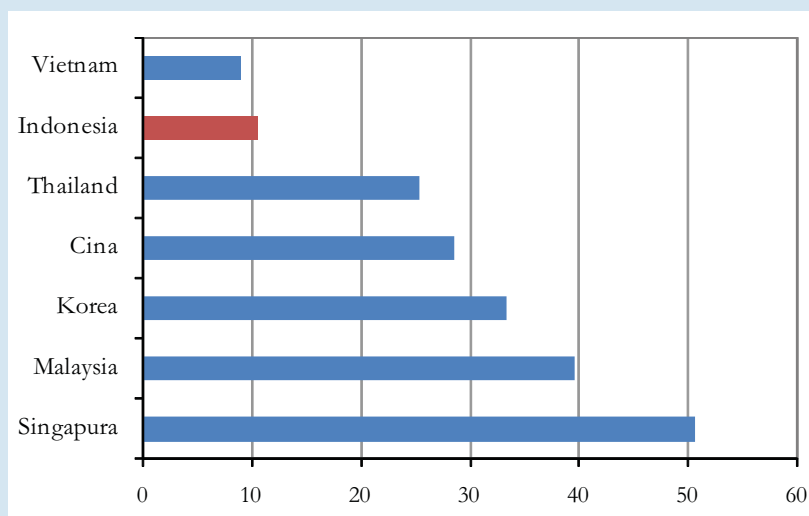
Tekanan yang lebih besar pada pendidikan adalah perlu, jika Indonesia hendak menciptakan lapangan kerja di sektor sekunder dan tersier. Bahkan, investasi pada modal insani merupakan kunci untuk meningkatkan ke-inklusif-an pertumbuhan ekonomi.²⁸ Indonesia, bagaimanapun, tertinggal jauh di belakang saingan regional dalam hal pencapaian pendidikan angkatan kerja. Dengan hanya 27,1 persen tenaga kerja memiliki pendidikan sekunder ke atas, tingkat keterampilan pekerja Indonesia tertinggal dibandingkan para pesaingnya di wilayah ini. Jumlah teknologi tinggi yang rendah dalam ekspor (Gambar 2.7) secara umum mencerminkan terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil.

Gambar 2.6
Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan (2007, %)



Sumber: Bank Dunia, *World Databank*

Gambar 2.7
Ekspor Teknologi Tinggi (sebagai % dari ekspor yang diproduksi, 2008)



Sumber: Bank Dunia, *World Databank*

Catatan : Data untuk Vietnam adalah di tahun 2007

Tantangan khusus dalam pengembangan keterampilan adalah jarak waktu antara pendidikan dan/atau pelatihan keterampilan dengan titik ketika keterampilan tersebut tersedia untuk aktivitas ekonomi. Setiap pekerjaan membutuhkan sejumlah keterampilan tertentu yang membutuhkan pelatihan bertahun-tahun untuk menguasainya. Beberapa pekerjaan membutuhkan latar belakang pendidikan yang spesifik, yang semakin memperluas jarak waktu. Oleh sebab itu, penyedia pelatihan keterampilan yang efektif dan pembuat kebijakan perlu mengembangkan program-program pelatihan keterampilan yang memenuhi tuntutan keterampilan saat ini dan masa yang akan datang.

Pertanyaan yang menantang adalah bagaimana meramalkan tuntutan keterampilan di masa yang akan datang. Untuk beberapa pekerjaan, kecenderungan demografis memberikan petunjuk yang baik bagi tuntutan keterampilan di masa depan. Misalnya, perkiraan distribusi usia dari sebuah populasi di suatu wilayah memberikan indikasi berapa banyak ahli kesehatan dan guru yang akan diperlukan di wilayah tersebut. Bagaimanapun juga, tidak ada metode yang akurat dan terjamin untuk meramalkan tuntutan keterampilan di masa depan karena adanya berbagai ketidakpastian yang tidak dapat difaktorkan berdasar teori daripada kenyataan yang sebenarnya (*a priori*) seperti penemuan dalam teknologi, perubahan kebijakan, dan variasi dalam investasi dan perdagangan luar negeri. Dengan mengingat keterbatasan ini, memahami sifat dari tuntutan keterampilan, dan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tuntutan keterampilan dapat membantu dalam memformulasikan kebijakan pengembangan keterampilan.

Ada tiga kategori tuntutan keterampilan di negara berkembang dengan perekonomian informal yang besar. Pertama, perubahan dalam output berdasarkan sektor menentukan tuntutan keterampilan (*market-driven skills demand*). Contohnya, peningkatan produksi mobil menuntut lebih banyak tenaga kerja yang mampu memasang bagian-bagian mesin dan montir mobil. Menganalisa sektor-sektor perekonomian, kecenderungan investasi, potensi bisnis dan sumber daya lokal yang belum digali membantu untuk meramalkan tuntutan keterampilan yang didorong oleh pasar. Kedua, kebijakan industri dan rencana pembangunan jangka menengah mengubah tuntutan keterampilan (*policy-driven skills demand*). Misalnya, jika pemerintah provinsi berhasil menginvestasikan pembangunan pariwisata, keterampilan keramah-tamahan (*hospitality*) akan dicari di provinsi tersebut. Oleh karena itu, mengantisipasi tuntutan keterampilan yang timbul akibat kebijakan membantu dalam meramalkan keterampilan. Terakhir, yang tidak kalah penting, sektor informal sering menuntut keterampilan yang berbeda dalam sifat dan dalam skala dari perekonomian formal. Sebab itu, penelitian yang berbasis komunitas²⁹ diperlukan untuk menganalisa tuntutan keterampilan bagi petani skala kecil dan usaha rumah tangga.

Analisa kesenjangan keterampilan untuk pengembangan keterampilan yang proaktif

29 *Community Employment Assessment* (Penilaian Ketenagakerjaan Masyarakat) merupakan metode yang berguna untuk analisa tuntutan keterampilan tingkat masyarakat. Metode ini dikembangkan oleh proyek *Training for Rural Economic Empowerment* (TREE). Untuk informasi lebih lanjut mengenai proyek TREE, kunjungi : http://www.ilo.org/skills/what/projects/lang--en/WCMS_103528/index.htm [20 April 2010].

Kombinasi dari analisa pada tiga jenis tuntutan keterampilan, analisa pasar lapangan kerja, dan informasi kualitatif menghasilkan gambaran yang lebih jelas dari tuntutan keterampilan di masa yang akan datang, bahkan jika tidak terlalu tepat. Membandingkan tuntutan keterampilan yang diharapkan di masa mendatang dan persediaan pelatihan keterampilan saat ini membantu mengidentifikasi kesenjangan di mana intervensi kebijakan diperlukan. Mengoordinasikan berbagai penyedia pelatihan keterampilan dan menyelaraskan prioritas pengembangan keterampilan dengan tuntutan keterampilan dari sektor yang sedang bertumbuh dan prioritas kebijakan akan membantu perekonomian untuk dapat menggali potensi ekonomi yang ada secara efektif.

Gambar 2.8
Kerangka Analisa Kesenjangan Keterampilan



Pengakuan keterampilan yang efektif

Pengembangan keterampilan akan berhasil meningkatkan kemampuan tenaga kerja terlatih untuk dipekerjakan hanya ketika dikombinasikan dengan mekanisme pengakuan keterampilan yang efektif. Dalam hal ini, penilaian standar kompetensi nasional dan pola sertifikasi merupakan hal yang diperlukan untuk semua pelatihan dan pendidikan kejuruan teknis. Mekanisme pengakuan keterampilan ini membutuhkan adanya sistem akreditasi yang wajib dan dapat diandalkan yang menjamin mutu pelatihan dan pendidikan kejuruan teknis. Untuk itu, Indonesia telah mengambil langkah awal menuju arah ini.

2.4 Hubungan Industrial

Mengapa hubungan industrial penting?

Di mana mekanisme pasar mengalokasikan sumber daya secara optimal dan menentukan ukuran lapangan kerja dan tingkat upah, dan di mana pengadilan menyelesaikan perselisihan dan menjalankan keputusan pengadilan, peran apa yang dapat dimainkan oleh hubungan industrial? Beberapa ekonom memandang serikat pekerja dan perundingan bersama

sebagai gangguan potensial bagi mekanisme pasar dan bahwa, dalam teori, tidak adanya lembaga pasar tenaga kerja seperti itu akan memaksimalkan kegunaannya secara keseluruhan. Pembaca mungkin bertanya lalu mengapa dan dengan cara apa hubungan industrial dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, memperbaiki kondisi kerja bagi para tenaga kerja yang tergabung maupun tidak dalam serikat pekerja, dan dengan demikian berkontribusi kepada pengurangan kemiskinan? Ada berbagai jawaban untuk ini dan laporan ini mencatat dua di antaranya yang sesuai dengan pembahasan dalam laporan ini. Pertama, dialog sosial di tingkat nasional dapat menjadi motor yang kuat dalam mengejar tujuan ekonomi dan sosial. Kedua, hubungan industrial yang konstruktif di tingkat perusahaan akan mengarah pada produktivitas dan profitabilitas yang lebih tinggi, yang kemudian akan memperbaiki kondisi kerja.

Hubungan industrial dapat menuntun pada keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang sering bertentangan dari para pelaku bisnis sebagai hasil dari dialog sosial. Sejumlah kasus memperlihatkan bahwa perundingan bersama, yang mengatur pengaturan upah dan kondisi kerja lainnya, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, menyimpang dari apa yang mungkin telah ditentukan oleh mekanisme pasar yang berlaku. Beberapa memperdebatkan bahwa perundingan bersama mendorong kenaikan upah dan meningkatkan perlindungan kerja bagi para anggota serikat pekerja dengan mengorbankan pihak luar. Meski terdengar bertentangan, ada beberapa kasus di mana terjadi yang sebaliknya. Bahkan, serikat pekerja kadang-kadang mengatur tuntutan upah demi kepentingan bersama.³⁰ Mitra sosial di negara-negara yang telah memiliki tradisi korporat atau neo-korporat³¹ telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menjalin konsensus pada tujuan ekonomi dan sosial dan untuk secara bersama-sama menentukan tingkat upah dalam rangka memajukan tujuan sosial dan ekonomi yang disepakati, seperti penciptaan lapangan kerja, stabilitas pekerjaan, kondisi kerja yang lebih baik, dan pengaturan jaminan sosial, dan meraih tingkat kemampuan kerja (*employability*) yang lebih tinggi melalui pengembangan keterampilan.

Untuk menggambarkan peran yang dapat dimainkan oleh hubungan industrial dalam memajukan tujuan ekonomi dan sosial, pengalaman Swedia, Jepang, Belanda, dan Denmark patut untuk disimak. Model Swedia, lebih tepatnya solidaritas kebijakan upah (model Rehn-Meidner) di tahun 1950-an sampai 1960-an, dengan menerapkan upah yang sama untuk jenis pekerjaan

*Keseimbangan
yang terkordinasi
dan strategis dari
kepentingan bersama*

30 Calmfors L. dan J. Driffill, "Bargaining Structure, Corporatism, and Macroeconomic Performance," *Economic Policy* 6 1988, 13-61.

31 C. Crouch: "Revised diversity: from the neo-liberal decade to beyond Maastricht", dalam J. van Ruysseveldt and J. Visser eds.): *Industrial Relations in Europe* (London, Sage publications, 1996), pp.358-375. Crouch mencirikan budaya neo-korporat dengan peran ganda yang dimainkan oleh modal dan tenaga kerja dalam memajukan kepentingan para konstituen, yaitu para pemilik lapangan kerja dan para tenaga kerja, sementara memoderasi tuntutan konstituen dari tingkat nasional untuk mewujudkan kepentingan ekonomi dan masyarakat yang telah disepakati bersama.

yang sama, sementara memberikan keunggulan kompetitif untuk perusahaan industri olahan yang efisien. Kesuksesan Jepang akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama tahun 1960-an dan 1970-an banyak berhutang pada model hubungan industrial khusus yang dimilikinya, yang menekankan investasi yang besar pada modal insani dan stabilitas kerja. Model ini didukung dengan apa yang disebut upah senioritas: pekerja menerima upah lebih rendah dibandingkan produktivitas mereka ketika berusia muda, dan memperoleh upah yang lebih tinggi ketika beranjak tua. Kurva upah ini memberikan insentif kepada para pekerja untuk bertahan pada satu perusahaan dan juga menyediakan insentif bagi para pekerja untuk berinvestasi pada pekerjaan mereka. Di akhir tahun 1990-an serikat pekerja dan pengusaha Belanda melaksanakan reformasi jaminan sosial dalam rangka mengurangi beban para pekerja dan pengusaha, sementara di saat yang sama mengembangkan tujuan-tujuan sosial lainnya. Serikat pekerja Belanda menyetujui pemotongan beberapa manfaat jaminan sosial dan memoderasi tuntutan upah sebagai ganti untuk pengurangan waktu kerja, keseimbangan antara hidup dan kerja yang lebih baik, dan peningkatan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, model Denmark dikenal akan kombinasi sukses dari tunjangan pengangguran yang besar, kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif dan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Model ini telah menjadi rujukan kebijakan pasar tenaga kerja Eropa.

Dialog sosial di tingkat perusahaan dapat meningkatkan produktivitas

Dalam rangka meraih kesepakatan yang strategis dari kondisi kerja dan kebijakan pasar tenaga kerja pada tingkat makro, kita harus memperhatikan hubungan industrial yang harmonis dan membangun di tingkat perusahaan. Fitur lain yang menonjol dari model Jepang adalah kerjasama yang sistematis antara manajemen dan pekerja dari tingkat bawah. Beberapa fitur dari sistem produksi Jepang, seperti *Kaizen* (perbaikan) dan QC (*quality circle*/lingkaran kualitas) dikenal akan pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas produksi, produktivitas, dan pengaturan kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem-sistem produksi ini bergantung pada dialog sosial yang membangun pada level bawah. Oleh karena itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah mengembangkan bahan pelatihan untuk meningkatkan hubungan industrial pada tingkat perusahaan.

Hubungan industrial di Indonesia saat ini³²

Sejak diperkenalkannya Undang-Undang Serikat Buruh Tahun 2000, telah ada perubahan-perubahan penting dalam budaya dan praktik dialog sosial antara sektor swasta, serikat pekerja, dan pemerintah. Akhir-akhir ini, penyelenggaraan forum bipartit nasional pada Februari 2008, oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan konfederasi serikat pekerja utama (KSBSI, KSPI dan KSPSI) menandai pencapaian kunci dalam dialog sosial di tingkat nasional. Forum ini dirancang untuk membantu penyelesaian perselisihan kerja yang lebih cepat dan memfasilitasi pembahasan reformasi undang-undang ketenagakerjaan nasional. Komitmen untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama lebih lanjut dari kedua belah pihak ditunjukkan

32 Miranda Fajerman berkontribusi pada bagian ini

di awal tahun 2010 dengan dibentuknya sekretariat permanen untuk forum ini di kantor pusat Apindo.

Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah memainkan peranan penting dalam mendorong dialog sosial pada tingkat perusahaan dengan mendorong pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS-Bipartit) melalui Surat Keputusan Bersama pada Oktober 2008.³³ Sejumlah 826 LKS-Bipartit terdaftar di tahun 2008 dan jumlah LKS-Bipartit yang terdaftar telah mencapai 12.417 (dari total 14.504 perusahaan terdaftar yang mempekerjakan 50 pekerja atau lebih) hingga bulan Februari 2010.³⁴ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menargetkan paling sedikit 400 unit kerjasama bipartit yang dibentuk setiap tahunnya dalam empat tahun ke depan di perusahaan-perusahaan besar.³⁵ Dalam perusahaan yang memiliki LKS-Bipartit, fungsi dan peranan LKS-Bipartit sebagai forum komunikasi antara manajemen dan pekerja di dalam perusahaan masih membutuhkan kejelasan dan pemahaman dari pekerja dan pengusaha karena terkadang LKS-Bipartit dianggap bersaing dengan peran tradisional serikat pekerja di perusahaan.³⁶

Serikat pekerja berperan penting dalam mengorganisir tenaga kerja, khususnya dalam ekonomi formal, namun keanggotaannya masih relatif rendah dan kapasitas tawar mereka meninggalkan banyak ruang untuk pengembangan. Serikat pekerja mewakili kurang dari 10 persen tenaga kerja sektor formal, atau kira-kira 3 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Jumlah serikat kerja telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, tetapi hal ini belum diikuti oleh peningkatan dalam jumlah tenaga kerja yang terorganisir. Keanggotaan dalam serikat pekerja pada kenyataannya mengalami penurunan. Serikat pekerja menghubungkan penurunan keanggotaan secara keseluruhan dengan meningkatnya penggunaan tenaga kerja kontrak (*outsourcse workers*) dan kontrak dengan jangka waktu tertentu.³⁷ Terlepas dari usaha-usaha penyetaraan gender di tingkat nasional, keanggotaan dan kepemimpinan perempuan dalam serikat pekerja pada tingkat perusahaan dan lokal tetap lemah.

33 Surat Keputusan Menteri No. PER.16/MEN/X/2008, 49/2008/933.1/M-IND/10/2008 dan 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang menjaga momentum pembangunan perekonomian nasional dalam mengantisipasi pembangunan perekonomian global.

34 Sakernas Februari 2010, Ditjen PHI dan Jamsos

35 MoMT Renstra 2010-2014.

36 ASEAN/ILO (2010), *Emerging Industrial Relations issues and trend in ASEAN Countries in the time of financial and economic crisis – dispute prevention: Indonesia Context*, ASEAN/ILO Japan Project.

37 Miranda Fajerman. *Baseline study of trade unions in 5 provinces Indonesia* (Kantor ILO Jakarta, akan datang).

Tabel 2.4
Serikat Pekerja di Indonesia Tahun 2008

Konfederasi	Jumlah federasi	Jumlah tenaga kerja yang diorganisir
KSPSI	16	1.601.378
KSPI	7	458.345
KSBSI	12	337.670
Federasi independen	26	910.318
Serikat pekerja perusahaan	-	97.924
Total	61	3.405.635

Sumber : Overseas Vocational Training Association

Dari total 208.637 perusahaan terdaftar di Indonesia, termasuk 53.805 dengan lebih dari 25 karyawan, hanya 10.959 yang telah mendaftarkan perjanjian kerja bersama.³⁸ Seringkali perjanjian bersama ini hanya memberikan manfaat yang sangat sedikit, melampaui syarat minimum yang ditetapkan undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi serikat pekerja serta perundingan bersama di tingkat perusahaan di seluruh Indonesia. Serikat pekerja juga tetap sangat terbagi-bagi, khususnya pada tingkat lokal dan provinsi, dan persekutuan antara serikat pekerja dengan kelompok masyarakat lainnya, seperti koperasi petani, sangat terbatas, yang menyebabkan lemahnya solidaritas dalam pergerakan serikat pekerja di Indonesia.³⁹

Komitmen nyata dari pemerintah untuk memperkuat dialog tripartit telah ditunjukkan melalui serangkaian keputusan baru-baru ini. Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada April 2009 tentang Perwakilan Lembaga Kerjasama Tripartit,⁴⁰ bertujuan untuk memperkuat fungsi forum tripartit dengan melembagakan badan-badan ini dan mengakhiri partisipasi khusus (*ad hoc*) seperti yang telah menjadi praktik umum. Keputusan tersebut membutuhkan 15 perwakilan untuk ditunjuk secara formal sebagai anggota-anggota forum tripartit pada setiap tingkatan – nasional, provinsi, dan kabupaten. Saat ini ada satu forum nasional, 32 di tingkat provinsi dan 195 di tingkat kabupaten.⁴¹ Lembaga Tripartit Nasional bertemu secara teratur dan telah mulai memberikan rekomendasi kepada pemerintah nasional dalam penyusunan dan amandemen dari berbagai peraturan. Di awal tahun 2010, pemerintah mengeluarkan surat keputusan kedua untuk mendukung fungsi dari kerjasama tripartit ini di tingkat provinsi dan kabupaten.⁴² Surat keputusan bersama yang dikeluarkan menteri ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dan konsistensi peraturan antara lembaga-lembaga lokal, regional,

38 Sakernas Februari 2010, Ditjen PHI dan Jamsos

39 Miranda Fajerman, *ibid*

40 Keputusan Presiden No. 37 Tahun 2009 tentang Perwakilan Lembaga Kerjasama Tripartit

41 Sakernas Februari 2010, Ditjen PHI dan Jamsos

42 Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri, Keputusan No. 17 Tahun 2010

dan nasional dan untuk mendukung fungsi dari badan-badan ini. Namun demikian, kelemahan institusional yang signifikan dalam kapasitas forum-forum ini pada tingkat provinsi dan kabupaten tetap ada. Kemenakertrans menargetkan untuk menciptakan kira-kira 50 forum tripartit baru di tingkat kabupaten setiap tahunnya, hingga tahun 2015.⁴³

Kotak 4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tantangan-tantangan Utama di Indonesia

Tiga tahap mekanisme penyelesaian hubungan perselisihan

Di bawah Undang-undang No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk untuk memberikan solusi perselisihan industrial yang tepat waktu, adil, pantas, dan hemat biaya. Sebelum mengajukan perselisihan kerja ke PHI, para pihak harus melalui satu dari tiga bentuk penyelesaian perselisihan: konsiliasi, arbitrase, atau mediasi. Dua pilihan pertama tersebut saat ini kurang dimanfaatkan oleh para pekerja dan pengusaha. Jika pihak-pihak tersebut tidak puas dengan keputusan PHI, mereka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Tantangan-tantangan kunci dalam penyelesaian konflik

Mediasi, mekanisme yang lebih disukai untuk penyelesaian perselisihan sebelum dibawa ke PHI, tidak terbukti berhasil dalam menyelesaikan perselisihan. Sifat persetujuan melalui mediasi yang tidak mengikat secara hukum dan kurangnya kewajiban bagi pihak-pihak untuk berpartisipasi dalam perundingan “niat baik” hanya memberikan dorongan yang kecil bagi pihak-pihak yang berselisih untuk dengan sungguh-sungguh mengambil bagian dalam mediasi. Rekomendasi dari mediator jarang diterima. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya beban kasus bagi PHI.

PHI menghadapi serangkaian tantangan administratif, prosedural, dan sumber daya manusia sehingga menghambat PHI dalam menunaikan tugasnya. Pada semua tingkat, pengadilan gagal untuk menyelesaikan perselisihan kerja dalam jangka waktu yang ditentukan terutama karena kurangnya jumlah hakim yang signifikan dalam PHI. Sebagian besar perselisihan kerja yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial kemudian naik banding ke Mahkamah Agung, menyebabkan penundaan yang signifikan dalam memberikan putusan. Hingga Juli 2010, Mahkamah Agung memiliki timbunan kasus yang belum dikerjakan sebesar 400 kasus perselisihan kerja, lebih dari 80 persennya menyangkut perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja.

Penundaan yang lama dalam menyelesaikan perselisihan, sebagai gantinya, meningkatkan ketidakpastian status pekerjaan, penghasilan, dan keamanan bagi pekerja dan membuat penerimaan kembali hampir tidak mungkin terjadi dan kompensasi telah jauh melampaui batas waktu. Untuk

43 Rencana strategis Kemenakertrans 2010-2014.

pengusaha, kegagalan untuk mengikuti kerangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan perselisihan membuat pengaturan rencana produksi menjadi sangat sulit, khususnya dalam kasus yang melibatkan sejumlah besar pekerja. Pelaksanaan putusan secara sukarela tetap menjadi sebuah tantangan, khususnya dalam kasus yang berlarut-larut dan kasus yang melibatkan perintah untuk mempekerjakan pekerjaanya kembali. Jika tidak ada pelaksanaan putusan secara sukarela, pihak yang memenangkan kasus harus mengajukan petisi tambahan kepada pengadilan wilayah untuk meminta pelaksanaan putusan. Hal ini menambah kerumitan, penundaan waktu, dan biaya penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Sumber : Miranda Fajerman, Penilaian Kebutuhan Pelatihan bagi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial(Kantor ILO Jakarta, 2011).

*Pergeseran dari
moderasi upah de
facto tanpa adanya
perolehan alternatif*

Pembangunan kapasitas dari pihak-pihak yang melakukan negosiasi merupakan tugas yang mendesak, khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten, jika Indonesia mau memperoleh manfaat dari hubungan industrial. Saat ini, kurangnya koordinasi strategis pada tingkat nasional tampaknya telah menjebak Indonesia dalam moderasi upah *de facto* tanpa perolehan alternatif. Peningkatan nominal dalam upah telah diimbangi oleh inflasi dan upah riil sedikit meningkat di dasawarsa terakhir. Karena kurangnya perundingan taktis, para pekerja belum menerima banyak perolehan alternatif (misalnya pengurangan jam kerja, hak sosial seperti cuti paternitas, cakupan jaminan sosial) untuk moderasi upah *de facto* mereka. Moderasi upah, jika diterapkan sebagai pilihan strategis mitra sosial, dapat menuntun kepada daya saing harga sektor ekspor dan, pada gilirannya, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, dalam kasus Indonesia, apresiasi Rupiah secara riil terhadap mata uang utama telah mendorong biaya tenaga kerja secara substansial dalam mata uang investor, menghapuskan keuntungan seperti yang dapat dihasilkan oleh moderasi upah. Pengembangan sektor-sektor padat karya melambat meski peningkatan daya beli tenaga kerja ditekan.

*Hubungan
industrial untuk
memperkuat daya
saing melalui
peningkatan
produktivitas*

Dengan surplus tenaga kerja yang besar, daya saing perekonomian Indonesia terletak pada produksi padat karya. Hal ini, bagaimanapun, tidak menunjukkan bahwa negara ini harus bergantung pada biaya tenaga kerja yang rendah. Dengan apresiasi mata uang, kebijakan industri yang bergantung pada tenaga kerja berbiaya rendah akan menerima hukuman ganda. Upah nominal harus sangat rendah untuk dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya di Asia dalam hal upah dolar (atau mata uang utama lainnya), yang sudah pasti akan menjerat lebih banyak lagi pekerja dalam kemiskinan. Bahkan, sekitar 40 persen tenaga kerja Indonesia menerima upah di bawah upah minimum yang dirancang untuk dapat mencukupi hidup satu orang dewasa, bukan sebuah keluarga. Hukuman lain dari persaingan biaya tenaga kerja adalah penurunan upah nominal akan merusak konsumsi, yang merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena para pemimpin G-20 sepakat untuk menahan

diri dari intervensi mata uang untuk mendorong depresiasi mata uang dan Indonesia adalah anggota G-20, devaluasi rupiah bukan merupakan pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan yang dapat dijalankan adalah mengejar jalur pertumbuhan yang dikendalikan produktivitas. Dengan cara ini, peran hubungan industrial di Indonesia adalah jelas: peningkatan produktivitas pada tingkat perusahaan melalui dialog sosial yang membangun. Pengalaman dari model Jepang memberikan masukan yang berguna bagi tujuan ini.

2.5 Perlindungan Sosial

Secara keseluruhan, sistem perlindungan sosial Indonesia dicirikan oleh kombinasi jaminan sosial, yang bertindak sebagai inti sistem dan masyarakat juga program-program sosial pro-masyarakat miskin yang ditargetkan untuk rumah tangga yang menambah skema jaminan sosial. Skema jaminan sosial mencakup pegawai pemerintah, militer dan personel polisi, dan bagian dari tenaga kerja formal di sektor swasta. Sebagian besar dari mereka yang dijamin relatif cukup mampu di antara tenaga kerja Indonesia. Secara umum, sistem perlindungan sosial di Indonesia sebagian besar meninggalkan para tenaga kerja yang berada di golongan menengah dari distribusi pendapatan. Lebih jauh, tenaga kerja informal yang miskin, yang tidak berada dalam kemiskinan ekstrim, sering mendapati diri mereka tidak terlindungi oleh skema jaminan sosial ataupun menjadi target dari program sosial yang memberikan manfaat bagi golongan penghasilan terendah. Sebab itu, masih ada tantangan dalam memperluas cakupan perlindungan sosial.

Program-program sosial yang ditargetkan melengkapi jaminan sosial yang terbelakang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melindungi sebagian kecil tenaga kerja sektor swasta terhadap risiko-risiko usia lanjut, cedera akibat kerja, kesehatan, dan kematian. Jamsostek diharapkan dapat melindungi para tenaga kerja dalam perusahaan yang memiliki 10 tenaga kerja atau lebih yang penghasilannya lebih dari Rp 1 juta (90 dolar Amerika Serikat). Usia pensiun untuk dana jaminan sosial ini adalah 55 tahun. Jaminan kesehatan melindungi suami/istri dan hingga tiga orang anak di bawah usia 22 tahun dari pekerja yang diasuransikan. Pengusaha yang memberikan jaminan kesehatan yang lebih unggul tidak harus berkontribusi terhadap premi asuransi kesehatan Jamsostek. Untuk tenaga kerja sektor publik, ada tiga skema yang menjamin pegawai negeri, polisi, dan anggota militer (Tabel 2.6). Sedangkan untuk pekerja lainnya, sebagian besar masih tidak terlindungi oleh skema jaminan sosial. Bahkan, sekitar 83 persen tenaga kerja tidak dilindungi oleh jaminan sosial (usia tua, cedera dan kematian akibat kerja).⁴⁴ Perlindungan kesehatan lebih tinggi, sebesar 46 persen berkat penyediaan perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin yang didanai pajak (Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jamkesmas).⁴⁵

Jaminan sosial tidak memadai karena cakupannya yang sempit

44 ILO: *Social security in Indonesia: Advancing the development agenda* (Jakarta, 2008)

45 National Social security council, DJSN, 2010

Tabel 2.5
Angka Kontribusi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

	Besarnya kontribusi (berdasarkan persentase gaji/upah tetap)	
	Dibayar oleh perusahaan	Dibayar oleh tenaga kerja
Cedera akibat kerja	0,24-1,74 %*	-
Tunjangan kematian	0,3 %	-
Tabungan hari tua	3,7 %	2,0%
Perawatan kesehatan**	3,0 %	-
* Besarnya persentase bergantung pekerjaan		
** Maksimal Rp 60.000/bulan untuk tenaga kerja yang menikah dan Rp 30.000 untuk tenaga kerja yang belum menikah		

Sumber: PwC, Indonesian Pocket Tax Book 2010

Tabel 2.6
Jaminan Sosial di Indonesia

Skema Jaminan	Target	Perlindungan resiko
<i>Jamsostek</i>	Tenaga kerja sektor formal	Tabungan hari tua, cedera akibat kerja, kesehatan, dan tunjangan kematian
<i>Taspen</i>	Pegawai negeri	Pensiun (usia lanjut, cacat, janda/duda dari penerima pensiun, dan kecelakaan tenaga kerja)
<i>Askes</i>	Pegawai negeri dan pensiunan polisi dan militer	Tunjangan kesehatan
<i>Asabri</i>	Militer dan polisi	Pensiun dan tunjangan kematian

Catatan: Beberapa laporan menggolongkan Jamkesmas (sebelumnya dikenal sebagai Askeskin) sebagai jaminan sosial. Laporan ini mengelompokkan skema jaminan tersebut sebagai program sosial yang menargetkan rumah tangga karena merupakan perawatan kesehatan yang didanai pajak bagi masyarakat kurang mampu.

Berbagai program sosial bagi masyarakat miskin

Berbagai program pro-masyarakat miskin yang didanai pemerintah membantu untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Beberapa program secara langsung ditujukan bagi keluarga miskin sementara yang lainnya disediakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu (Tabel 2.7). Pemerintah memulai kebanyakan dari program-program ini sebagai respons terhadap krisis. Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) dan Beras bagi Rakyat Miskin (Raskin) berawal dari respons kebijakan terhadap krisis keuangan Asia. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas, sebelumnya dikenal sebagai Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diterapkan untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga bahan bakar yang tiba-tiba akibat pemotongan subsidi bahan bakar. Bantuan tunai bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) diperkenalkan di tahun 2007, mengikuti kesuksesan dari program serupa di Amerika Latin.

Tabel 2.7
Program Sosial Utama yang Ditujukan bagi Rumah Tangga dan Masyarakat Miskin

Program	Deskripsi
Program-program sosial bagi rumah tangga	
Raskin	Penyediaan beras tersubsidi
BLT	Bantuan langsung tunai (diterapkan kembali di tahun 2008 dan 2009)
PKH	Bantuan tunai bersyarat
Jamkesmas	Perawatan kesehatan gratis (jaminan kesehatan)
Program-program sosial bagi masyarakat	
PNPM-Mandiri	Proyek pengembangan masyarakat yang diajukan oleh masyarakat setempat dan didanai pemerintah
BOS	Bantuan operasional yang diberikan ke sekolah-sekolah dalam masyarakat miskin sehingga biaya sekolah lebih rendah atau dihapuskan.

Pemerintah Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berada di bawah Wakil Presiden di tahun 2008 untuk meningkatkan hubungan kebijakan dan memperbaiki koordinasi perlindungan sosial dan inisiatif penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh berbagai lembaga pemerintah. Tim ini beranggotakan perwakilan-perwakilan senior dari 22 kementerian dan kepala-kepala dari semua lembaga sentral dengan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga kelompok: bantuan sosial dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro. Dengan meningkatkan pengelolaan program sosial, pemerintah menargetkan untuk mencapai target pengurangan kemiskinan seperti dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2010-2014) penurunan angka kemiskinan dari 14,2 persen di tahun 2009 menjadi 8,0 persen di tahun 2014.

Pengelolaan inisiatif perlindungan sosial ditingkatkan

Tabel 2.8
Tiga kelompok sistem program-program sosial

Kelompok I: Bantuan sosial dan perlindungan sosial

Inisiatif di bawah kelompok ini menyediakan bantuan tunai dan subsidi bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin. Bantuan ini menargetkan untuk memungkinkan para penerimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan bahan pangan, rumah, air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan.

Program-program yang berada di kelompok ini : *Raskin, Jamkesmas, PKH, dan BOS*

Kelompok II : Pemberdayaan masyarakat

Program-program di bawah kelompok ini memberdayakan masyarakat kurang mampu dan membangun kapasitas pemerintah setempat dalam melayani masyarakat yang ditargetkan. Untuk membiaya program-program tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana bantuan bagi masyarakat (*Community Block Grants*). Patut dicatat bahwa PNPM-Mandiri menjamin keterlibatan perempuan dalam pertemuan-pertemuan perencanaan masyarakat dan pengajuan proposal program.

Program yang berada dalam kelompok ini : *PNPM-Mandiri*

Kelompok III: Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil

Kelompok ini bermaksud untuk mendukung pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil dengan meningkatkan akses bagi pemilik usaha kecil atau wirausahawan kepada modal dan juga menyediakan pendidikan keuangan. Jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman-pinjaman oleh lembaga publik dan mempromosikan penggunaan pinjaman yang produktif untuk pengembangan bisnis merupakan langkah untuk mencapai tujuan. Tujuan utama dari kelompok ini adalah untuk memberdayakan para penerimanya dalam menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

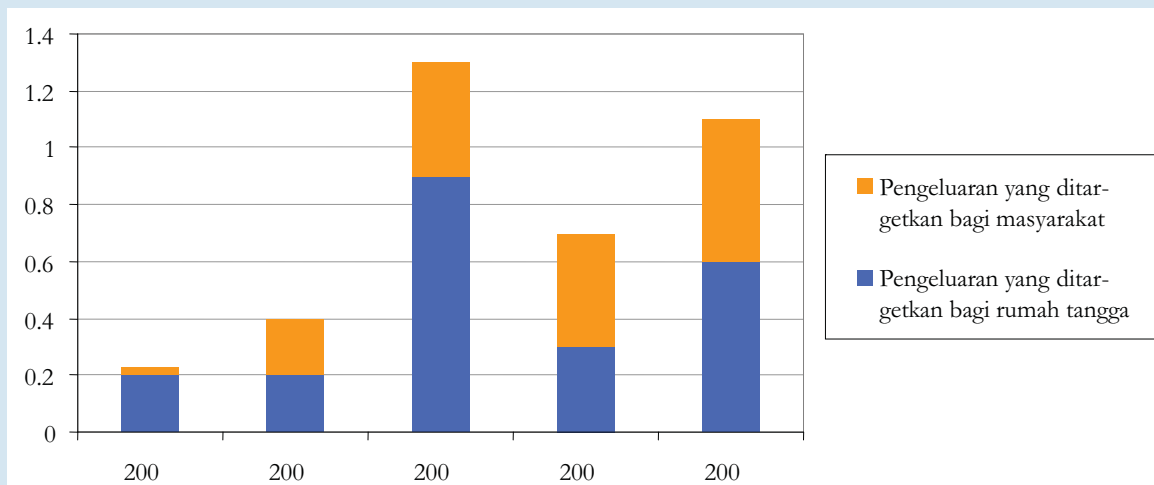
Program yang berada di dalam kelompok ini: *KUR*

Alokasi anggaran yang fleksibel bagi perlindungan sosial

Fitur penting dari anggaran perlindungan sosial adalah kefleksibelannya. Dengan kata lain, pemerintah menyesuaikan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Gambar 2.9 dengan jelas menunjukkan peningkatan pengeluaran untuk perlindungan sosial di tahun 2006 dan 2008 seiring dengan usaha pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar di tahun 2005 dan resesi global yang berawal di tahun 2008. Bantuan tunai tanpa syarat diterapkan sebagai respons terhadap guncangan yang memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan keluarga miskin.

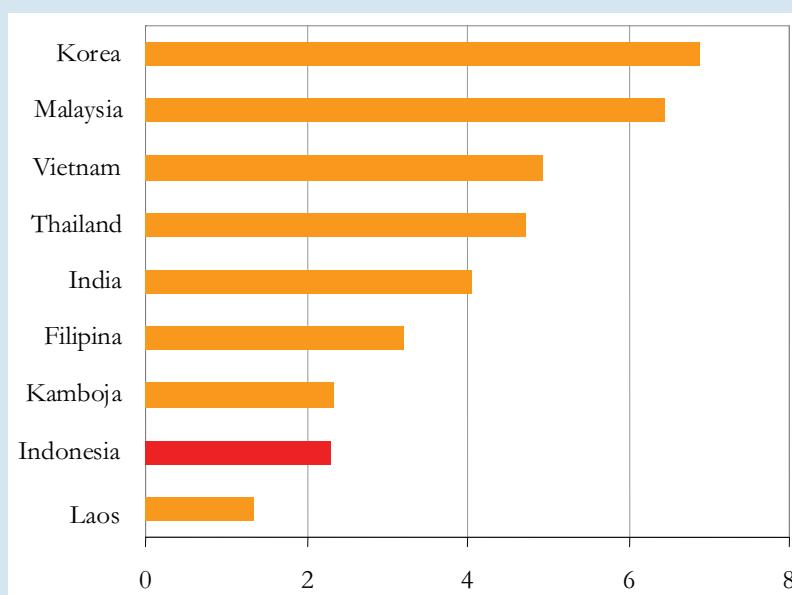
Secara umum, pengeluaran untuk perlindungan sosial telah mengalami tren ekspansif. Pemerintah telah menargetkan lebih banyak lagi rumah tangga yang berada di bawah program bantuan langsung tunai dan memperluas Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat. Bahkan dengan peningkatan yang terus-menerus dalam pengeluaran untuk perlindungan sosial ini, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga dalam hal komitmen negara pada perlindungan sosial (Gambar 2.10). Karenanya, masih ada ruang untuk mengeksplorasi lebih jauh ekspansi fiskal bagi perlindungan sosial.

Gambar 2.9
Pengeluaran untuk Perlindungan Sosial (berdasarkan % PDB, 2004–2008)



Sumber: Bank Dunia dan Sekretariat ASEAN, *Country report of the ASEAN assessment on the social impact of the global financial crisis: Indonesia*

Gambar 2.10
Pengeluaran Negara untuk Jaminan Sosial (berdasarkan % PDB, Data tahun terakhir)



Sumber: ILO, *World social security report 2010/11*

Pemerintah Indonesia menyatakan kebulatan tekad untuk mengatasi masalah-masalah dengan sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berkerja di luar negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Beberapa masalah yang diidentifikasi dan disebutkan dalam RPJM termasuk: kurangnya perlindungan bagi tenaga kerja migran dipandang dari sudut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang berlaku (tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia), eksistensi calo tenaga kerja, dan kurangnya pengetahuan dan penghargaan pekerja migran terhadap hak-hak dasar kerja khususnya pekerja migran perempuan, kebutuhan untuk memperluas dan memperkuat akses perbankan dan sistem asuransi bagi para pekerja migran, dan kebutuhan untuk meningkatkan sistem pembayaran pekerja migran.

*Perlindungan
bagi tenaga kerja
migran⁴⁶*

Pemberdayaan keuangan dari para pekerja migran seperti meningkatkan akses kepada keuangan mikro dan menggunakan remitansi untuk perlindungan sosial bagi para pekerja migran dan keluarga mereka juga akan efektif untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Di bulan Desember 2010, Indonesia meluncurkan program kredit mikro (KUR) untuk membantu biaya penempatan pekerja migran. Pemerintah Indonesia juga menunjukkan minatnya untuk meningkatkan program-program kewirausahaan bagi para pekerja migran yang telah kembali ke tanah air.

Menurut Rencana Tindakan dari RPJM 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakertrans akan mengambil tindakan-tindakan berikut selama lima tahun ke depan untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia:

46 Albert Y. Bonasahat berkontribusi pada bagian ini

- ♦ Meninjau kebijakan nasional dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Pekerja Migran tahun 1990;
- ♦ Meninjau dan amandemen legislatif dari Undang-Undang Nasional No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan peraturan yang mengimplementasikan perubahan peraturan tersebut;
- ♦ Persentase calon pekerja migran menerima pelayanan dari kantor tenaga kerja lokal yang lebih tinggi;
- ♦ Lebih banyak calon tenaga kerja migran yang menghadiri penerangan ringkas (*briefing*) sebelum keberangkatan;
- ♦ Pengeluaran kartu identitas pekerja migran;
- ♦ Pembuatan sistem pangkalan data untuk pekerja Indonesia di luar negeri; dan
- ♦ Penempatan tambahan utusan Atase Tenaga Kerja.

Kementerian Luar Negeri berencana untuk meningkatkan jumlah Pusat Pelayanan Warga Negara di luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pangkalan data warga negara Indonesia di luar negeri, dan untuk memberikan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk bagi para pekerja migran Indonesia. Selain itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian berencana untuk memfasilitasi pengembangan pinjaman, produk-produk asuransi, dan skema remitansi bagi pekerja migran Indonesia.

Lampiran I. Pembagian Lapangan Kerja dalam Perekonomian Formal dan Informal menurut BPS

Status pekerjaan	Pekerjaan utama									
	Tenaga profesional, teknis dan pekerjaan terkait lainnya	Tenaga administrasi dan manajerial	Juru tulis dan kerja terkait lainnya	Tenaga penjualan	Tenaga di bidang jasa	Tenaga di industri pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan pemburu	Tenaga produksi dan pekerjaan terkait lainnya	Tenaga transportasi dan operator peralatan	Pekerja	Lainnya
Bekerja sendiri tanpa karyawan	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Bekerja sendiri, dibantu pegawai sementara/tidak dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pengusaha	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Karyawan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Karyawan lepas di pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Karyawan lepas bukan di pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja tidak dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Sumber: BPS Catatan: F berarti formal dan INF berarti informal										

Lampiran II. Lampiran Statistik

Table II.1.
Indikator Pasar Kerja -1990, 1995, 2000, 2005-2009

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Populasi ('000s)								
Laki-laki	177.385	191.501	205.280	219.210	221.954	224.670	227.345	229.965
Perempuan	88.886	95.910	102.675	109.513	110.863	112.200	113.518	114.807
	88.499	95.592	102.605	109.697	111.091	112.470	113.827	115.158
Populasi usia kerja (15+)								
Laki-laki	113.540.758	128.801.764	141.170.805	158.491.396	160.811.498	164.118.323	166.641.050	169.328.208
Perempuan	55.699.876	63.283.453	69.837.799	79.738.436	80.441.969	82.079.391	82.841.198	84.174.122
	57.840.882	65.518.311	71.333.006	78.752.960	80.369.529	82.038.932	83.799.852	85.154.086
Non angkatan kerja								
Laki-laki	38.189.135	44.575.774	43.366.311	52.633.743	54.422.563	54.176.964	54.693.785	55.494.928
Perempuan	9.583.392	9.781.213	10.104.712	12.006.917	12.692.078	13.359.504	13.696.861	13.765.035
	28.605.743	34.794.561	33.261.599	40.626.826	41.730.485	40.817.460	40.996.924	41.729.893
Angkatan kerja								
Laki-laki	75.351.623	84.225.990	97.804.494	105.857.653	106.388.935	109.941.359	111.947.265	113.833.280
Perempuan	46.116.484	53.502.240	59.733.087	67.731.519	67.749.891	68.719.887	69.144.337	70.409.087
	29.235.139	30.723.750	38.071.407	38.126.134	38.639.044	41.221.472	42.802.928	43.424.193
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)								
Laki-laki	66,4	65,4	69,3	66,8	66,2	67,0	67,2	67,2
Perempuan	82,8	84,5	85,5	84,9	84,2	83,7	83,5	83,6
	50,5	46,9	53,4	48,4	48,1	50,2	51,1	51,0

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Ketenagakerjaan								
Laki-laki	73.437.376	78.318.036	89.837.730	93.958.387	95.456.935	99.930.217	102.552.750	104.870.663
Perempuan	44.984.297	50.602.267	55.439.063	61.439.086	61.977.289	63.147.938	63.899.278	65.122.526
	28.453.079	27.715.769	34.398.667	32.519.301	33.479.646	36.782.279	38.653.472	39.748.137
Rasio tenaga kerja- penduduk (persen)								
Laki-laki	64,7	60,8	63,6	59,3	59,4	60,9	61,5	61,9
Perempuan	80,8	80,0	79,4	77,1	77,0	76,9	77,1	77,4
	49,2	42,3	48,2	41,3	41,7	44,8	46,1	46,7
Pengangguran								
Laki-laki	1.914.247	5.907.954	7.966.764	11.899.266	10.932.000	10.011.142	9.394.515	8.962.617
Perempuan	1.132.187	2.899.973	4.294.024	6.292.433	5.772.602	5.571.949	5.245.059	5.286.561
	782.060	3.007.981	3.672.740	5.606.833	5.159.398	4.439.193	4.149.456	3.676.056
Tingkat pengangguran (persen)								
Laki-laki	2,5	7,0	8,1	11,2	10,3	9,1	8,4	7,9
Perempuan	2,5	5,4	7,2	9,3	8,5	8,1	7,6	7,5
	2,7	9,8	9,6	14,7	13,4	10,8	9,7	8,5

Sumber: Population: UN, World population prospects: the 2008 revision; For all other indicators: BPS.

Table II.2.
Indikator Pasar Kerja Muda (usia 15-24) -1990, 1995, 2000, 2005-2009

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Populasi usia kerja	34.083.155	37.429.551	38.268.568	42.282.753	42.152.876	43.061.390	42.439.529	43.160.687
Laki-laki	16.775.258	18.309.565	18.806.152	21.094.391	21.500.254	21.960.724	21.511.842	21.873.697
Perempuan	17.307.897	19.119.986	19.462.416	21.188.362	20.652.622	21.100.666	20.927.687	21.286.990
Non angkatan kerja	16.705.890	17.279.702	17.297.885	19.969.234	19.872.306	20.548.852	20.855.631	21.436.435
Laki-laki	6.539.097	6.311.542	6.802.610	7.982.447	8.233.472	8.164.244	8.591.818	8.739.589
Perempuan	10.166.793	10.968.160	10.495.275	11.986.787	11.638.834	12.384.608	12.263.813	12.696.846
Angkatan kerja	17.377.265	20.149.849	20.970.683	22.313.519	22.280.570	22.512.538	21.583.898	21.724.252
Laki-laki	10.236.161	11.998.023	12.003.542	13.111.944	13.266.782	13.796.480	12.920.024	13.134.108
Perempuan	7.141.104	8.151.826	8.967.141	9.201.575	9.013.788	8.716.058	8.663.874	8.590.144
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	51,0	53,8	54,8	52,8	52,9	52,3	50,9	50,3
Laki-laki	61,0	65,5	63,8	62,2	61,7	62,8	60,1	60,0
Perempuan	41,3	42,6	46,1	43,4	43,6	41,3	41,4	40,4
Ketenagakerjaan	15.995.104	16.120.343	15.886.404	14.853.883	15.464.354	16.852.502	16.552.881	16.902.483
Laki-laki	9.437.955	9.995.182	9.186.013	9.166.087	9.578.277	10.518.143	10.100.765	10.291.497
Perempuan	6.557.149	6.125.161	6.700.391	5.687.796	5.886.077	6.334.359	6.452.116	6.610.986
Rasio tenaga kerja-penduduk (persen)	46,9	43,1	41,5	35,1	36,7	39,1	39,0	39,2
Laki-laki	56,3	54,6	48,8	43,5	44,5	47,9	47,0	47,0
Perempuan	37,9	32,0	34,4	26,8	28,5	30,0	30,8	31,1

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Pengangguran								
Laki-laki	1.382.161	4.029.506	5.084.279	7.459.636	6.816.216	5.660.036	5.031.017	4.821.769
Perempuan	798.206	2.002.841	2.817.529	3.945.857	3.688.505	3.278.337	2.819.259	2.842.611
	583.955	2.026.665	2.266.750	3.513.779	3.127.711	2.381.699	2.211.758	1.979.158
Tingkat pengangguran (persen)								
Laki-laki	8,0	20,0	24,2	33,4	30,6	25,1	23,3	22,2
Perempuan	7,8	16,7	23,5	30,1	27,8	23,8	21,8	21,6
	8,2	24,9	25,3	38,2	34,7	27,3	25,5	23,0

Sumber: BPS.

Table II.3.
Status ketenagakerjaan – 1990, 1995, 2000, 2005–2009

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Total								
Pekerja mandiri	14.810.823	19.892.221	19.501.330	17.296.006	19.504.632	20.324.527	20.921.567	21.046.007
Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar	17.884.242	15.473.358	20.720.366	20.987.165	19.946.732	21.024.297	21.772.994	21.933.546
Pengusaha	584.992	1.250.124	2.032.527	2.849.076	2.850.448	2.883.832	3.015.326	3.033.220
Pegawai	20.832.755	28.215.271	29.498.039	26.027.953	26.821.889	28.042.390	28.183.773	29.114.041
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	5.534.842	5.541.158	5.917.315	5.991.493	5.878.894
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4.325.365	4.618.280	4.458.857	5.292.262	5.670.709
Pekerja tanpa bayaran	19.323.358	13.487.062	18.085.468	16.937.980	16.173.796	17.278.999	17.375.335	18.194.246
Total	73.436.170	78.318.036	89.837.730	93.958.387	95.456.935	99.930.217	102.552.750	104.870.663
Laki-laki								
Pekerja mandiri	9.965.441	13.537.146	13.222.375	12.358.294	13.551.397	13.557.406	13.536.283	13.761.401
Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar	14.127.834	11.670.075	16.128.013	16.897.505	15.669.243	15.890.034	16.253.889	16.440.465
Pengusaha	489.313	1.057.996	1.608.168	2.460.974	2.466.231	2.374.922	2.486.057	2.516.447
Pegawai	14.343.900	19.992.511	19.788.206	17.706.648	17.934.753	18.911.566	18.484.669	18.638.015
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	3.642.291	3.724.423	3.767.045	3.827.136	3.739.483
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	3.635.460	3.868.884	3.713.920	4.348.290	4.723.354
Pekerja tanpa bayaran	6.057.151	4.344.539	4.692.301	4.737.914	4.762.358	4.933.045	4.962.954	5.303.361
Total	44.983.639	50.602.267	55.439.063	61.439.086	61.977.289	63.147.938	63.899.278	65.122.526
Perempuan								
Pekerja mandiri	4.845.382	6.355.075	6.278.955	4.937.712	5.953.235	6.767.121	7.385.284	7.284.606
Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar	3.756.408	3.803.283	4.592.353	4.089.660	4.277.489	5.134.263	5.519.105	5.493.081

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Pengusaha	95.679	192.128	424.359	388.102	384.217	508.910	529.269	516.773
Pegawai	6.488.855	8.222.760	9.709.833	8.321.305	8.887.136	9.130.824	9.699.104	10.476.026
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	1.892.551	1.816.735	2.150.270	2.164.357	2.139.411
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	689.905	749.396	744.937	943.972	947.355
Pekerja tanpa bayaran	13.266.207	9.142.523	13.393.167	12.200.066	11.411.438	12.345.954	12.412.381	12.890.885
Total	28.452.531	27.715.769	34.398.667	32.519.301	33.479.646	36.782.279	38.653.472	39.748.137
Percentage shares								
Total								
Pekerja mandiri	20,2	25,4	21,7	18,4	20,4	20,3	20,4	20,1
Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar	24,4	19,8	23,1	22,3	20,9	21,0	21,2	20,9
Pengusaha	0,8	1,6	2,3	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Pegawai	28,4	36,0	32,8	27,7	28,1	28,1	27,5	27,8
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	5,9	5,8	5,9	5,8	5,6
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	4,8	4,5	5,2	5,4
Pekerja tanpa bayaran	26,3	17,2	20,1	18,0	16,9	17,3	16,9	17,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Laki-laki								
Pekerja mandiri	22,2	26,8	23,9	20,1	21,9	21,5	21,2	21,1
Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar	31,4	23,1	29,1	27,5	25,3	25,2	25,4	25,2
Pengusaha	1,1	2,1	2,9	4,0	4,0	3,8	3,9	3,9
Pegawai	31,9	39,5	35,7	28,8	28,9	29,9	28,9	28,6
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	5,9	6,0	6,0	6,0	5,7
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	5,9	6,2	5,9	6,8	7,3
Pekerja tanpa bayaran	13,5	8,6	8,5	7,7	7,7	7,8	7,8	8,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Perempuan								
Pekerja mandiri	17,0	22,9	18,3	15,2	17,8	18,4	19,1	18,3
Pengusaha, dengan pegawai	13,2	13,7	13,4	12,6	12,8	14,0	14,3	13,8
sementara/tidak dibayar								
Pengusaha	0,3	0,7	1,2	1,2	1,1	1,4	1,4	1,3
Pegawai	22,8	29,7	28,2	25,6	26,5	24,8	25,1	26,4
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	5,8	5,4	5,8	5,6	5,4
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,2	2,0	2,4	2,4
Pekerja tanpa bayaran	46,6	33,0	38,9	37,5	34,1	33,6	32,1	32,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS.

Table II. 4
Pekerjaan berdasarkan sektor - 1990, 1995, 2000, 2005-2009

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Total								
Pertanian	40.559.333	34.009.912	40.680.229	41.309.776	40.136.242	41.206.474	41.331.706	41.611.840
Pertambangan	512.270	633.224	451.931	904.194	923.591	994.614	1.070.540	1.155.233
Manufaktur	7.468.270	9.901.478	11.641.756	11.952.985	11.890.170	12.368.729	12.549.376	12.839.800
Listrik, gas dan air	134.716	215.694	70.629	194.642	228.018	174.884	201.114	223.054
Konstruksi	2.046.415	3.746.553	3.497.232	4.565.454	4.697.354	5.252.581	5.438.965	5.486.817
Perdagangan, restoran dan hotel	10.837.931	13.684.652	18.489.005	17.909.147	19.215.660	20.554.650	21.221.744	21.947.823
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	2.302.014	3.447.218	4.553.855	5.652.841	5.663.956	5.958.811	6.179.503	6.117.985
Kuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	477.765	658.497	882.600	1.141.852	1.346.044	1.399.490	1.459.985	1.486.596
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	9.098.662	12.020.808	9.570.493	10.327.496	11.355.900	12.019.984	13.099.817	14.001.515
Total	73.437.376	78.318.036	89.837.730	93.958.387	95.456.935	99.930.217	102.552.750	104.870.663
Laki-laki								
Pertanian	24.637.241	21.931.497	24.603.835	26.891.514	26.369.336	25.983.403	25.913.925	26.194.970
Pertambangan	429.922	532.821	370.253	765.326	817.716	874.271	938.427	1.017.609
Manufaktur	4.124.470	5.713.677	6.722.850	7.033.757	7.005.482	7.119.262	7.128.631	7.219.614
Listrik, gas dan air	123.870	188.928	65.020	179.174	202.721	153.669	183.913	202.129
Konstruksi	1.987.777	3.646.520	3.356.604	4.465.861	4.574.450	5.119.560	5.311.318	5.355.015
Perdagangan, restoran dan hotel	5.190.377	6.973.033	9.684.593	9.711.815	10.330.764	10.372.192	10.514.476	10.747.420
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	2.249.749	3.373.662	4.364.293	5.480.334	5.373.961	5.586.530	5.465.585	5.529.935
Kuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	353.089	475.122	627.229	835.396	953.079	995.458	1.028.203	1.049.872

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	5.887.802	7.767.007	5.644.386	6.075.909	6.349.780	6.943.593	7.414.800	7.805.962
Total	44.984.297	50.602.267	55.439.063	61.439.086	61.977.289	63.147.938	63.899.278	65.122.526
Perempuan								
Pertanian	15.922.092	12.078.415	16.076.394	14.418.262	13.766.906	15.223.071	15.417.781	15.416.870
Pertambangan	82.348	100.403	81.678	138.868	105.875	120.343	132.113	137.624
Manufaktur	3.343.800	4.187.801	4.918.906	4.919.228	4.884.688	5.249.467	5.420.745	5.620.186
Listrik, gas dan air	10.846	26.766	5.609	15.468	25.297	21.215	17.201	20.925
Konstruksi	58.638	100.033	140.628	99.593	122.904	133.021	127.647	131.802
Perdagangan, restoran dan hotel	5.647.554	6.711.619	8.804.412	8.197.332	8.884.896	10.182.458	10.707.268	11.200.403
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	52.265	73.556	189.562	172.507	289.995	372.281	713.918	588.050
Kuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	124.676	183.375	255.371	306.456	392.965	404.032	431.782	436.724
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	3.210.860	4.253.801	3.926.107	4.251.587	5.006.120	5.076.391	5.685.017	6.195.553
Total	28.453.079	27.715.769	34.398.667	32.519.301	33.479.646	36.782.279	38.653.472	39.748.137
Persentase pembagian								
Total								
Pertanian	55,2	43,4	45,3	44,0	42,0	41,2	40,3	39,7
Pertambangan	0,7	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
Manufaktur	10,2	12,6	13,0	12,7	12,5	12,4	12,2	12,2
Listrik, gas dan air	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Konstruksi	2,8	4,8	3,9	4,9	4,9	5,3	5,3	5,2
Perdagangan, restoran dan hotel	14,8	17,5	20,6	19,1	20,1	20,6	20,7	20,9
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	3,1	4,4	5,1	6,0	5,9	6,0	6,0	5,8

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	12,4	15,3	10,7	11,0	11,9	12,0	12,8	13,4
Total	100	100	100	100	100	100	100	100
Laki-laki								
Pertanian	54,8	43,3	44,4	43,8	42,5	41,1	40,6	335,6
Pertambangan	1,0	1,1	0,7	1,2	1,3	1,4	1,5	13,0
Manufaktur	9,2	11,3	12,1	11,4	11,3	11,3	11,2	11,1
Listrik, gas dan air	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	92,5
Konstruksi	4,4	7,2	6,1	7,3	7,4	8,1	8,3	2,6
Perdagangan, restoran dan hotel	11,5	13,8	17,5	15,8	16,7	16,4	16,5	68,6
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	5,0	6,7	7,9	8,9	8,7	8,8	8,6	137,7
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0,8	0,9	1,1	1,4	1,5	1,6	1,6	70,8
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	13,1	15,3	10,2	9,9	10,2	11,0	11,6	13,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	745,4
Perempuan								
Pertanian	56,0	43,6	46,7	44,3	41,1	41,4	39,9	38,8
Pertambangan	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Manufaktur	11,8	15,1	14,3	15,1	14,6	14,3	14,0	14,1
Listrik, gas dan air	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Konstruksi	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
Perdagangan, restoran dan hotel	19,8	24,2	25,6	25,2	26,5	27,7	27,7	28,2

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	0,2	0,3	0,6	0,5	0,9	1,0	1,8	1,5
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0,4	0,7	0,7	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	11,3	15,3	11,4	13,1	15,0	13,8	14,7	15,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS.

Table II.
Indikator-indikator Latar Belakang

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Produk Domestik Bruto (PDB) (tingkat pertumbuhan tahunan - persen)	4,9	3,6	4,5	4,8	5,0	5,7	5,5	6,3	6,0	4,5
<i>Sumber: ADB, Key Indicators for Asia and the Pacific 2010</i>										
PDB per kapita (konstan 2000, dolar Amerika Serikat)	804	822	848	877	909	948	988	1.038	1.088	1.124
<i>Sumber: Bank Dunia, World Development Indicators</i>										
PDB per kapita pada PPP, (<i>purchasing power parity</i> (PPP) (constant 2005 international \$))	2.714	2.788	2.875	2.973	3.082	3.217	3.352	3.521	3.689	3.813
<i>Sumber: Bank Dunia, World Development Indicators</i>										
Jumlah kaum miskin (jutaan - definisi nasional)	38,7	37,9	38,4	37,3	36,1	35,1	39,3	37,2	35,0	32,5
Persentase kaum miskin	19,4	18,4	18,2	17,4	16,7	16,0	17,8	16,6	15,4	14,2
<i>Sumber: BPS.</i>										